



LKJIP

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

**KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
INSPEKTORAT

Jalan Graha Pancasila No. 02 Telepon (0253) 201168
e.mail inspektorat@pandeglangkab.go.id Web : <http://www.inspektorat.pandeglangkab.go.id>
PANDEGLANG 42211

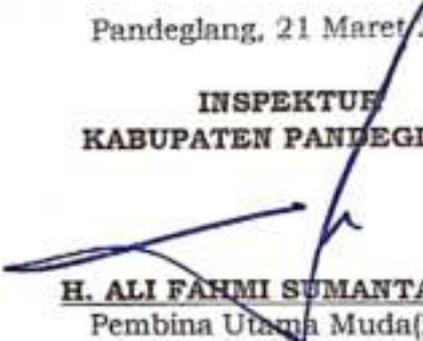
**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pandeglang, 21 Maret 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN PANDEGLANG**


H. ALI FAHMI SUMANTA, M.Si
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19680620 199312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
INSPEKTORAT

Jalan Graha Pancasila No. 02 Telepon (0253) 201168
e.mail inspektorat@pandeglangkab.go.id Web : <http://www.inspektorat.pandeglangkab.go.id>
PANDEGLANG 42211

Pandeglang, 21 Maret 2022

Nomor : 700/544 -INSP/2022.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk Tahun Anggaran 2021.**

Kepada
Yth. Bupati Pandeglang
Di

PANDEGLANG

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.
2. Dasar Reviu
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 05 tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
 - c. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Pandeglang, Nomor:800/480-ST/2022 tanggal 14 Maret 2022.
3. Pelaksanaan Reviu Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan mulai tanggal 15 Maret sampai dengan 21 Maret 2022.
4. Tujuan dan Sasaran Reviu Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021.

5. Ruang Lingkup Reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021.
6. Simpulan dan Rekomendasi
 - 6.1. Simpulan
 - 6.1.1. Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

 - 6.1.1.1. Telah memuat perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah;
 - 6.1.1.2. Telah memuat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 - 6.1.1.3. Telah memuat Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD;
 - 6.1.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional belum seluruhnya dilakukan;
 - 6.1.1.5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusinya belum seluruhnya dilakukan;
 - 6.1.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dilakukan;
 - 6.1.1.7. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya belum dilakukan, analisa baru sebatas realisasi anggaran dan penyusunan pelaksanaan APBD.
 - 6.1.2. Kesimpulan terhadap Mekanisme Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - 6.1.2.1. Laporan Kinerja IP telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;
 - 6.1.2.2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai;
 - 6.1.2.3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja;
 - 6.1.2.4. Penanggungjawab pengumpulan data / informasi belum ditetapkan; masih dilaksanakan oleh Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan di unit kerja;
 - 6.1.2.5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) dapat diyakini keandalannya;
 - 6.1.2.6. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait.
 - 6.1.3. Kesimpulan terhadap Subtansi atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - 6.1.3.1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
 - 6.1.3.2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan RPJMD;
 - 6.1.3.3. Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam RPJMD;
 - 6.1.3.4. Indikator Kinerja Utama telah dibuat secara formal;
 - 6.1.3.5. Terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;

- 6.1.3.6. Indikator Kinerja Sasaran strategis secara umum telah memenuhi syarat SMART dan cukup namun masih terdapat pernyataan indikator sasaran strategis yang masih belum berorientasi outcome yaitu antara lain:
- Jumlah pembinaan, pemberdayaan umat beragama.
 - Pembangunan dan pemanfaatan GOR Multiguna sebagai Gedung Pemuda dan Pusat Inovasi Pemuda
- 6.1.3.7. Belum seluruh sasaran strategis disajikan perbandingan capaian kerjanya, antara lain :
- Capaian Kinerja untuk perjanjian kinerja "meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat" pada indikator sasaran strategis "Persentase Balita Gizi Buruk" dan "Indeks Angka Harapan Hidup/Indeks Kesehatan" tidak dicantumkan realisasi dan capaian kerjanya.
 - Capaian Kinerja untuk perjanjian kinerja "Terkendalnya angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi" pada indikator sasaran strategis "Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun" dan indikator Sasaran Strategis "Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi" cara penghitungan capaian kerjanya belum dapat diyakini.
- 6.1.3.8. Terdapat beberapa Indikator Sasaran Strategis yang tercantum pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 tidak diukur untuk Penilaian Kinerja, sebagai berikut :
- a. Pada Sasaran strategis yang kedua yaitu "Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat" ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) Indikator Sasaran Strategis. Penilaian Kinerja atas sasaran strategis tersebut hanya diukur atas 6 (enam) indikator Sasaran Strategis saja, Untuk Indikator PDHRB ADHK Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tidak dicantumkan realisasi target dan nilai capaian kerjanya
- b. Pada Sasaran Strategis yang ketujuh yaitu "Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Indikator Sasaran Strategis. Penilaian Kinerja atas sasaran strategis tersebut hanya diukur atas 4 (empat) Indikator Sasaran Strategis saja, sedangkan untuk 4 (empat) Indikator lainnya tidak dicantumkan realisasi dari target dan nilai capaian kerjanya, yaitu :
- Cakupan layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi Terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu
 - Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu
 - Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang:

1. Dalam hal Format Laporan Kinerja, agar menyajikan akuntabilitas keuangan.
2. Dalam hal Mekanisme Penyusunan secara umum telah sesuai;
3. Dalam hal Subtansi, agar:
 - Terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang masih berorientasi output, agar diubah menjadi berorientasi outcome;
 - Realisasi target dan capaian kinerja dari indikator sasaran strategis "Persentase Balita Gizi Buruk" dan "Indeks Angka Harapan Hidup/Indeks Kesehatan" pada sasaran strategis "meningkatkan kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat" agar dicantumkan.
 - Agar dilakukan konfirmasi dengan DP2KBP3A selaku OPD Pelaksana selaku penanggungjawab terkait dengan nilai capaian kinerja pada indikator sasaran strategis "Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun" dan indikator Sasaran Strategis "Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi".
 - Pengukuran capaian kinerja untuk sasaran strategis kedua yaitu "Meningkatnya Kualitas dan Aksebilitas Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat" dan sasaran strategis ke tujuh yaitu "Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" agar mengacu pada indikator sasaran strategis sebagaimana yang tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

**INSPEKTUR
KABUPATEN PANDEGLANG**

H. ALI FAHMI SUMANTA, M.Si
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19680620 199312 1 002



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 memuat gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis secara keseluruhan yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai capaian kinerja tahun ke-empat pelaksanaan RPJMD pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2016 – 2021.

Akhirnya mudah-mudahan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Pandeglang,

Maret 2022

BUPATI PANDEGLANG

Hj. IRHA NARULITA, SE, MM



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 PENDAHULUAN	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP	2
1.3 GAMBARAN UMUM	2
1.4 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	20
1.5 SISTEMATIKA LKjIP 2021	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016-2021	26
2.2 PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA KABUPATEN PANDEGLANG	63
3.2 PENCAPAIAN KINERJA BERDASARKAN MISI	103
3.3 REALISASI ANGGARAN	114
BAB IV PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	115
4.2 SARAN	116
LAMPIRAN	
I. PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021	
II. PENGHARGAAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017-2021	



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	JUMLAH KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020	4
TABEL 1.2	JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020	6
TABEL 1.3	INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PENDUDUK KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015-2017	8
TABEL 1.4	KOMPOSISI PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2020I	9
TABEL 1.5	ANGKA MELEK HURUF (LATIN) PENDUDUK USIA 10 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS KELAMIN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018- 2020I.....	10
TABEL 1.6	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018-2020I.....	11
TABEL 1.7	PRESENTASE PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN YANG DI TAMATKAN DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020I.....	12
TABEL 1.8	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018- 2020I.....	13
TABEL 1.9	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH MURNI MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018-2020	14
TABEL 1.10	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH KOTOR MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018-2020	15
TABEL 1.11	JUMLAH SEKOLAH, GURU, MURID DAN RASIO MURID- GURU MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020	16
TABEL 1.12	JUMLAH KEMATIAN BAYI DAN ANGKA HARAPAN HIDUP PENDUDUK DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016- 2017	18



TABEL 1.13	JUMLAH ANGKA KESAKITAN DAN RATA- RATA LAMANYA SAKIT PENDUDUK DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018-2020	18
TABEL 1.14	JUMLAH APARATUR PEMERINTAH DAERAH (PNS) DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020	19
TABEL 1.15	JUMLAH APARATUR PEMERINTAH DAERAH (PNS) DI KABUPATEN BERDASARKAN PENDIDIKAN PANDEGLANG TAHUN 2020	20
TABEL 2.1	PERJANJIAN KINERJA BUPATI SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021	31
TABEL 3.10	TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021	65
TABEL 3.11	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI PERTAMA	104
TABEL 3.12	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI KEDUA	105
TABEL 3.13	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI KETIGA.....	106
TABEL 3.14	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI KEEMPAT	107
TABEL 3.15	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI KELIMA	108
TABEL 3.16	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI KEENAM.....	109
TABEL 3.17	CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN VISI KABUPATEN PANDEGLANG	110
TABEL 3.18	TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIT SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021	73
TABEL 3.19	TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021	112
TABEL 3.20	TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 201	113
TABEL 3.21	SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021	114



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten Pandeglang berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Tata kelola pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Evaluasi perencanaan strategis setiap tahunnya tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana saat ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyusun LKjIP tahun 2021 yang merupakan implementasi Sistem AKIP tahun kedua atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Periode Tahun 2016-2021.

Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pandeglang diaktualisasikan dalam beberapa fungsi, urusan pemerintah daerah, program dan kegiatan. Fungsi dan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebanyak 9 fungsi dan 33 urusan pemerintah daerah yaitu:

1. Fungsi Pelayanan Umum, meliputi urusan pemerintahan daerah Perencanaan Pembangunan; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; Statistik; Kearsipan; serta Komunikasi dan Informatika.
2. Fungsi Ketentraman dan Ketertiban, meliputi urusan pemerintahan daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
3. Fungsi Ekonomi, meliputi urusan pemerintah daerah Ketenagakerjaan; Ketahanan Pangan; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal; Kelautan dan Perikanan; Pertanian; dan Perindustrian.
4. Fungsi Lingkungan Hidup, meliputi urusan pemerintah daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
5. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, meliputi urusan pemerintah daerah Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman.
6. Fungsi Kesehatan, meliputi urusan pemerintah daerah Kesehatan serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.



7. Fungsi Pariwisata dan Budaya, meliputi urusan pemerintah daerah Kebudayaan dan Pariwisata.
8. Fungsi Pendidikan, meliputi urusan pemerintah daerah Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Perpustakaan.
9. Fungsi Perlindungan Sosial, meliputi urusan pemerintah daerah Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta Sosial.

Berdasarkan pelaksanaan program/ kegiatan yang terhimpun dalam fungsi dan urusan pemerintahan daerah maka telah memberikan imbas berupa *outcome/* manfaat terhadap pencapaian target kinerja tahun 2021 yang didasarkan/ dikelompokkan dengan kedekatan antara sasaran strategis dengan misi Kabupaten Pandeglang. Nilai akuntabilitas kinerja tersebut sebagaimana uraian berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat : 90,10
2. Membangun konektivitas wilayah: 89,99%
3. Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian : 91,4%
4. Meningkatkan nilai tambah sektor maritim 92,2%
5. Modernisasi pengelolaan potensi wisata : 60,55%
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat sistem inovasi daerah: 97,10%

Capaian dari masing-masing misi tersebut menghasilkan capaian akuntabilitas kinerja berdasarkan visi tahun kelima yaitu **87,72%** dan masuk pada kategori "*memuaskan*".

Pencapaian kinerja pada tahun ke-empat periode 2016 - 2021 ada penurunan dari tahun 2020 yaitu **91,33 %**, ini dikarenakan ada beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai, akibat dari kondisi yang masih dalam keadaan pandemi Covid-19. Hal ini hendaknya menjadi bahan pendorong bagi jajaran pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja dalam mendukung proses pembangunan daerah serta lebih meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

Pada tahun yang akan datang, seiring dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang, penataan akuntabilitas kinerja Sistem AKIP (SAKIP). Perlu dioptimalkan dan dikembangkan secara konsekuen agar dapat bermanfaat, baik bagi perencanaan maupun pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENDAHULUAN

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja



dan perbandingan capaian indikator sasaran dengan demikian LKjIP Kabupaten Pandeglang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2021 yang merupakan tahun keempat RPJMD Tahun 2016 – 2021.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP TAHUN 2021

1.2.1. Maksud

LKjIP Kabupaten Pandeglang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang selama Tahun 2021 dalam melaksanakan misi dan mencapai visi Kabupaten Pandeglang sesuai dengan RPJMD .

1.2.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) antara lain :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang ,
- c. Menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

1.3 GAMBARAN UMUM

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu bagian wilayah administratif dari Provinsi Banten yang memiliki andalan di bidang pariwisata dan agribisnis dengan kekhususan tersendiri yang memberikan posisi cukup strategis bagi pengembangan perekonomian dan pembangunan.

GEOGRAFIS

Kabupaten Pandeglang, dengan luas wilayah daratan 2.747 Km² atau sebesar 29,98% dari luas Propinsi Banten, dengan panjang garis pantai 307 Km dan memiliki 33 pulau kecil dengan pulau Panaitan yang paling luas. Penggunaan lahan di kabupaten Pandeglang terdiri dari Hutan (30,41%), lahan sawah (19,93%) dan lahan kering/lainnya (49,66%).

Secara geografis, Kabupaten Pandeglang terletak antara 6°21' sampai 7°10' Lintang Selatan dan 104°48' sampai 106°11' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Serang
- Sebelah Timur : Kabupaten Lebak
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Selat Sunda

Gambar 1



Peta Wilayah Administrasi Kab Pandeglang

Kecamatan Pandeglang sebagai Ibukota Kabupaten terletak pada jarak 23 Km dari Ibukota Propinsi Banten (Serang) dan 111 Km dari Ibukota Negara (Jakarta). Secara umum daerah ini beriklim tropis dengan temperatur berkisar antara 22,5 °C hingga 27,9°C dengan suhu udara rata-rata untuk dataran rendah adalah 22,9 °C dan 22,5 °C untuk dataran tinggi.

Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pandeglang terbagi atas 35 Kecamatan, 326 Desa dan 13 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 1.1

Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Kabupaten Pandeglang,
Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH	
		DESA	KELURAHAN
1	KECAMATAN SUMUR	7	-
2	KECAMATAN CIMANGGU	12	-
3	KECAMATAN CIBALIUNG	9	-
4	KECAMATAN CIKEUSIK	14	-
5	KECAMATAN CIGEULIS	9	-
6	KECAMATAN PANIMBANG	6	-
7	KECAMATAN MUNJUL	9	-
8	KECAMATAN ANGSANA	9	-
9	KECAMATAN PICUNG	9	-
10	KECAMATAN BOJONG	8	-
11	KECAMATAN SAKETI	14	-
12	KECAMATAN CISATA	9	-
13	KECAMATAN PAGELARAN	13	-
14	KECAMATAN PATIA	10	-
15	KECAMATAN LABUAN	9	-
16	KECAMATAN JIPUT	13	-
17	KECAMATAN CIKEDAL	10	-
18	KECAMATAN MENES	12	-
19	KECAMATAN MANDALAWANGI	15	-
20	KECAMATAN CIMANUK	11	-
21	KECAMATAN CIPEUCANG	10	-
22	KECAMATAN BANJAR	11	-
23	KECAMATAN KADUHEJO	10	-
24	KECAMATAN PANDEGLANG	-	4
25	KECAMATAN CADASARI	11	-
26	KECAMATAN KARANGTANJUNG	-	4
27	KECAMATAN CIBITUNG	10	-
28	KECAMATAN CARITA	9	-
29	KECAMATAN SUKARESMI	10	-
30	KECAMATAN MEKARJAYA	8	-
31	KECAMATAN SINDANGRESMI	9	-
32	KECAMATAN PULOSARI	9	-
33	KECAMATAN KORONCONG	12	-
34	KECAMATAN MAJASARI	-	5
35	KECAMATAN SOBANG	8	-

Sumber : Data BPS Pandeglang Dalam Angka 2020



TOPOGRAFI

Secara umum bentuk topografi wilayah Kabupaten Pandeglang di daerah Tengah dan Selatan pada umumnya merupakan dataran dengan gunung-gunung yang ketinggiannya rendah (Gunung Payung, Gunung Honje, Gunung Tilu dan Gunung Raksa). Luas wilayah bagian selatan sekitar 85,07% dari wilayah luas kabupaten. Sedangkan daerah utara sekitar 14,93% dari luas kabupaten merupakan dataran tinggi, dimana terdapat gunung-gunung yang cukup tinggi (Gunung Karang, Gunung Pulosari dan Gunung Aseupan). Kabupaten Pandeglang memiliki sumber daya air yang relatif cukup banyak, hal ini nampak dari terdapatnya aliran 14 sungai yang bermuara di Selat Sunda dan 4 sungai yang bermuara di Samudera Indonesia.

DEMOGRAFI

Kependudukan erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Di lain pihak permasalahan yang menyangkut kependudukan sangat kompleks, untuk itu keberadaan informasi kependudukan sangat penting sebagai acuan dasar dalam setiap pengambilan kebijakan.

Penduduk Kabupaten Pandeglang hingga tahun 2021 tercatat berjumlah 1.272.687 jiwa terdiri dari laki-laki 653.411 jiwa dan perempuan 619.276 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 2.346 KK, dengan penambahan penduduk dari Tahun 2019 ke tahun 2021 sebesar 3.898 jiwa. Sedangkan Kepadatan penduduk Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2021 adalah 430 orang/ km² dengan sebaran penduduk relatif tidak merata, kecamatan dengan penduduk terjarang yaitu Kecamatan Sumur dengan rata-rata sebanyak 92 orang/km² sementara wilayah yang terpadat adalah Kecamatan Labuan yaitu sebanyak 3.622 orang/ km², sementara Laju Pertumbuhan Penduduk selama tahun 2000-2021 rata-rata sebesar 5,02 persen per tahun.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat menunjukkan tentang keadaan komposisi, distribusi dan laju perubahan penduduk di suatu daerah. Pengidentifikasian tentang hal tersebut akan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan struktur tata ruang daerah.



Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang,
Tahun 2021

NO	KECAMATAN	RUMAH TANGGA	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
			LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1	Sumur		12,242	11,964	24,206
2	Cimanggu		19,654	19,356	39,010
3	Cibaliung		15,803	14,860	30,663
4	Cibitung		11,457	11,029	22,486
5	Cikeusik		27,334	26,194	53,528
6	Cigeulis		18,239	17,439	35,678
7	Panimbang		26,493	25,265	51,758
8	Sobang		18,434	18,229	36,663
9	Munjul		11,820	11,431	23,251
10	Angsana		13,692	12,830	26,522
11	Sindangresmi		11,246	11,090	22,336
12	Picung		18,744	18,284	37,028
13	Bojong		17,877	17,336	35,213
14	Saketi		23,060	22,528	45,588
15	Cisata		12,409	12,135	24,544
16	Pagelaran		18,252	17,393	35,645
17	Patia		14,388	14,112	28,500
18	Sukaesmi		18,024	17,127	35,151
19	Labuan		29,572	27,491	57,063
20	Carita		17,227	16,428	33,655
21	Jiput		15,072	14,595	29,667
22	Cikedal		16,147	15,947	32,094
23	Menes		18,676	18,310	36,986
24	Pulosari		14,790	14,239	29,029
25	Mandalawangi		24,912	24,345	49,257
26	Cimanuk		20,661	19,770	40,431
27	Cipeucang		15,199	14,302	29,501
28	Banjar		15,821	15,561	31,382
29	Kaduhejo		18,279	17,936	36,215
30	Mekarjaya		9,854	9,896	19,750
31	Pandeglang		22,532	20,889	43,421
32	Majasari		25,426	23,948	49,374
33	Cadasari		17,363	15,569	32,932
34	Karangtanjung		17,894	16,643	34,537
35	Koroncong		9,711	9,134	18,845
Jumlah			618,304	593,605	1,211,909

Sumber : Data BPS PDA 2020



WILAYAH ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN

Kabupaten Pandeglang secara administratif sampai akhir tahun 2021 secara administratif jumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang berjumlah 35 Kecamatan dengan jumlah kelurahan dan desa sebanyak 13 kelurahan dan 326 desa.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, rencana pengembangan sistem pusat pelayanan dibagi menjadi rencana pengembangan sistem perkotaan dan rencana pengembangan sistem perdesaan.

A. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan terdiri dari :

- PKW dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan, simpul transportasi dan pusat jasa kemasyarakatan;
- PKWp dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, jasa keuangan/bank, simpul transportasi dan pusat jasa kemasyarakatan;
- PKL dengan fungsi utama sebagai pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan;
- PKLp dengan fungsi utama sebagai pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala lokal; dan
- PPK dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal.

B. Rencana system pengembangan perdesaan terdiri dari :

- ✓ Pengembangan PPL dengan fungsi utama sebagai pusat permukiman dengan skala kegiatan antar desa.
- ✓ Pengembangan kawasan agropolitan fungsi utama sebagai pusat pengembangan potensi pertanian di kawasan perdesaan
- ✓ Pengembangan kawasan minapolitan dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan potensi perikanan budidaya air tawar di kawasan perdesaan meliputi:



KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Kebijaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya ini menyangkut berbagai aspek yang sangat kompleks, selain berdampak terhadap ekonomi juga terhadap sosial politik masyarakat, termasuk tenaga kerja. Keberhasilan pembangunan bidang sosial tidak harus dapat dilihat dari segi fisik yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana sedangkan segi mental meliputi kondisi mental penduduknya.

Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara ekonomi maupun sosial. Bersumber dari BPS Kabupaten Pandeglang, angkatan kerja (dengan pengertian penduduk 10 tahun keatas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan) setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2021 sebanyak 1.211.911 orang terdapat 812.368 orang atau 67,96% merupakan Penduduk Usia Kerja (PUK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 491.031 orang atau sekitar 60,44 % merupakan angkatan kerja dan sisanya merupakan penduduk bukan angkatan kerja.

Tabel 1.3

Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Pandeglang,
Tahun 2018 - 2020

NO.	KARAKTERISTIK	TAHUN	
		2020	2021
1	2	3	4
1	Penduduk Usia Kerja (PUK)	836.878	936.978
2	Angkatan Kerja (AK)	514.100	522.301
	a. Bekerja	469.332	509.778
	b. Pengangguran (Mencari Kerja)	44.768	42.523
3	Bukan Angkatan Kerja	322.778	334.894
	a. Sekolah dan Mengurus RT	274.187	224.789
	b. Mengurus RT	39.585	68.585
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	61,44	61,44
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,71	8,71
6	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	91,29	91,29

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang

Partisipasi penduduk usia kerja dalam bekerja dan mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan rumah tangganya dapat dilihat melalui angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja mencakup mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk usia kerja. Dari hasil Sakernas tahun 2020, terlihat bahwa partisipasi penduduk usia kerja Kabupaten Pandeglang dalam bekerja dan mencari pekerjaan sebesar 61,44%. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini mengalami penurunan dari 62,81% pada tahun 2019. Bila dibedakan berdasarkan jenis kelamin, ada perbedaan angka yang cukup jauh antara TPAK laki-laki dengan perempuan. TPAK laki-laki sebesar 81,21% sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 40,97%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki jauh lebih besar dibandingkan perempuan dalam upaya mendapatkan penghasilan/pendapatan baik untuk dirinya maupun untuk rumah tangganya.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja pada tahun 2021 dapat dilihat dari angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 91,29 persen, angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 91,67 persen.

Tabel 1.4

Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2021

Lapangan Usaha	(%)
1. Pertanian	33,70
2. Industri Pengolahan	9,70
3. Perdagangan, Hotel & Restoran	22,74
4. Jasa Kemasyarakatan	14,54
5. Lainnya*)	19,32
Jumlah (jiwa)	

Sumber : BSPS Kab. Pandeglang Tahun 2019

*) Lainnya : sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor LGA, sektor Konstruksi, sektor Angkutan/Transportasi serta sektor keuangan dan jasa perusahaan



PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional maupun regional. Pembangunan bidang pendidikan akan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada pada suatu wilayah yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing masyarakat/penduduk dalam memasuki dunia kerja. Dengan pendidikan pula, pemerintah akan lebih mudah dalam mentransfer tujuan pembangunan kepada masyarakat karena tingkat pemahaman masyarakat akan lebih baik kalau pendidikan juga lebih baik.

Tolak ukur yang sangat mendasar di bidang pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis (Angka Melek Huruf) penduduk dewasa. Kemampuan membaca dan menulis dibedakan terhadap huruf latin, huruf lainnya, dan tidak dapat membaca dan menulis. Dalam tulisan ini yang dimaksud buta huruf adalah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Dengan memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin akan menjadikan seseorang lebih mudah memahami dan menyerap berbagai informasi baik dari media cetak maupun elektronik sehingga akan menambah pengetahuan bagi dirinya.

Kemampuan baca tulis tercermin dari indikator Angka Melek Huruf. Penduduk berusia 15 tahun ke atas di Pandeglang yang sudah mampu membaca dan menulis huruf latin tahun 2021 mencapai 97,13 persen, sisanya sebanyak 2,87 persen adalah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis sebagian besar terkonsentrasi pada penduduk usia tua, yaitu penduduk yang berumur 45 tahun ke atas.

Tabel 1.5

Angka Melek Huruf (Latin) Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas
Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015-2017

Jenis Kelamin	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	97,56	97,87	98,22
Perempuan	93,22	95,48	96,00
Laki-laki + Perempuan	95,43	96,65	97,13

Sumber : Susenas Tahun 2018 - 2020



Bila dibandingkan antara penduduk laki-laki dan perempuan, maka penduduk laki-laki lebih banyak yang sudah mampu membaca dan menulis, seperti terlihat pada **tabel 1.5** yaitu pada tahun 2021 untuk penduduk laki-laki sebesar 98,22 persen, sedangkan untuk perempuan sebesar 96,00 persen. Secara umum, kemampuan baca tulis masyarakat Pandeglang tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 baik secara total maupun jenis kelamin.

Indikator lain untuk melihat tingkat pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa lama penduduk Pandeglang mampu menyekolahkan anaknya. Rata-rata lama sekolah penduduk Pandeglang tahun 2021 baru mencapai 6,96 tahun, ini berarti rata-rata pendidikan penduduk Pandeglang baru sampai jenjang SLTP kelas satu. Jadi secara umum tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Pandeglang baru lulus SD dan sedikit yang melanjutkan ke jenjang SLTP.

Dalam rangka meningkatkan program wajar dikdas 9 tahun kiranya masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang khususnya bagi Dinas/Instansi terkait. Program ini dikatakan berhasil apabila Angka Partisipasi Sekolah anak usia 7-15 tahun mencapai 100 persen, dengan kata lain seluruh anak usia SD dan SLTP dalam keadaan bersekolah. Melihat perkembangan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencapai rata-rata lama sekolah 9 tahun akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Kiranya dibutuhkan program-program untuk mempermudah akses masyarakat ke sarana pendidikan setingkat SLTP. setingkat SLTP. Selain itu perlu juga menyadarkan masyarakat agar termotivasi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 1.6

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk
Kabupaten Pandeglang, Tahun 2018-2020

Tahun	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)
2018	6,63
2019	6,72
2020	6,96

Sumber : Susenas Tahun 2015 – 2017 dan Disdikbud

Selain indikator Angka Melek Huruf dan Ratarata Lama Sekolah, gambaran kualitas SDM Pandeglang dapat dilihat juga dari pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk itu sendiri. Pendidikan yang ditamatkan penduduk berumur 15 tahun keatas di Pandeglang tahun 2021 paling banyak adalah masih tingkat SD sederajat yaitu sebesar 42,33 persen, sedangkan SLTP hanya 22,83 persen. Yang sangat mengkhawatirkan adalah pada tahun 2019 masih ada penduduk yang tidak/belum tamat SD sederajat yaitu mencapai 16,11 persen, dimana pada kelompok ini masih terindikasi adanya penduduk diluar usia wajar dikdas (usia dewasa/tua).

Tabel 1.7

Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

Tingkat Jenjang	Laki- laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Tamat SD/MI/Sederajat	12,20	20,15	16,11
SD/MI/Sederajat	41,94	42,74	42,33
SLTP/Sederajat	24,04	21,58	22,83
SLTA/SMK/Sederajat	17,78	11,31	14,60
Universitas	4,04	4,21	4,12
J U M L A H	100,00	100,00	100,00

Sumber : Disdikbud Tahun 2020

Bila melihat komposisi pendidikan yang ditamatkan berdasarkan gender, penduduk laki-laki lebih baik dibandingkan penduduk perempuan yang belum atau tidak menamatkan SD sederajat. Di jenjang Pendidikan SD sederajat perempuan lebih mengungguli dari laki-laki. Di jenjang Pendidikan SLTP sederajat dan tingkat Pendidikan SLTA sederajat laki-laki mengungguli dari perempuan. Untuk Jenjang Pendidikan Universitas perempuan kembali mengungguli laki laki hal interlihat dalam tabel 4.3 lulusan Universitas perempuan lebih mengungguli dibandingkan laki-laki sebanyak 4.21 persen.

TINGKAT PARTISIPASI SEKOLAH

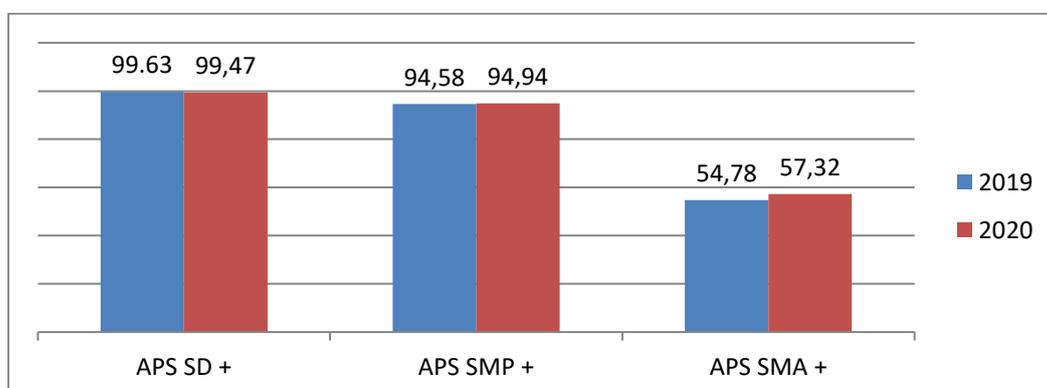
Partisipasi sekolah anak di Pandeglang dapat terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia SD/Sederajat, SLTP/Sederajat maupun SLTA/Sederajat. Angka ini menunjukkan partisipasi anak pada usia sekolah yang bersekolah, baik pada usia

SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun) maupun SLTA (16-18 tahun). Angka ini juga menunjukkan berapa besar keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan program pendidikan yang ada.

APS Kabupaten Pandeglang untuk anak usia SD sebesar 99,63 persen. Ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak anak usia SD yaitu 7 sampai 12 tahun yang bersekolah mencapai 99,63 persen, sisanya sebesar 0,37 persen dari anak usia SD tersebut tidak bersekolah baik yang putus sekolah maupun yang belum pernah sekolah. Partisipasi sekolah anak usia SD perempuan relatif lebih baik dibandingkan dengan partisipasi anak usia SD laki-laki yaitu masing-masing 99,00 persen dan perempuan 100 persen.

Bila dibandingkan dengan partisipasi sekolah anak usia SD, partisipasi sekolah anak usia SLTP dan SLTA jauh lebih rendah, salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi yang mengakibatkan kurangnya kemampuan masyarakat Pandeglang untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. APS SLTP tahun 2019 sebesar 94,94 persen dan APS SLTA sebesar 57,32 persen. Ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia SLTP (usia 13-15), yang bersekolah hanya 95 anak, atau dari 100 anak usia SLTP ada sekitar 5 anak yang tidak bersekolah dengan berbagai alasan yang ada di masyarakat. Sedangkan untuk anak usia SLTA menunjukkan bahwa dari 100 anak usia SLTA (usia 16-18) hanya 57 anak yang sedang duduk di bangku sekolah.

Tabel 1.8
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Pandeglang
Tahun 2019-2020



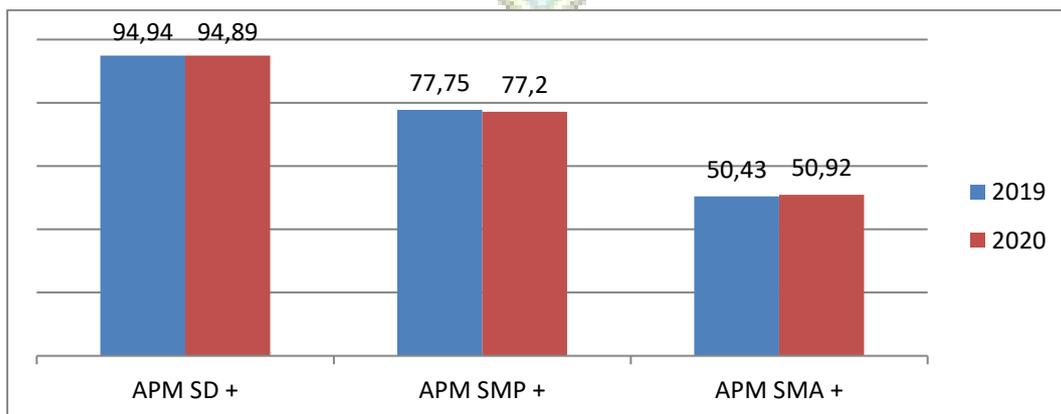
Sumber : Susenas Tahun 2019 - 2020

Bila dibandingkan berdasarkan gender, partisipasi sekolah anak usia SLTP (13-15 tahun) perempuan lebih baik dibandingkan anak laki-laki. Sedangkan untuk anak usia SLTA (16-18 tahun) partisipasi sekolah anak perempuan lebih kecil dibandingkan anak laki-laki.

Selain APS, biasanya untuk melihat partisipasi anak/masyarakat terhadap sekolah digunakan juga Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Murni merupakan persentase penduduk usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang sekolah tersebut terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang dimaksud. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar merupakan Persentase penduduk yang sekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia pendidikan tertentu.

Pada gambar 1.9 terlihat bahwa pada tahun 2020, Partisipasi Murni (APM) anak usia SD/MI/Sederajat tercatat sebesar 94,94, APM SLTP/Sederajat tercatat sebesar 77,75 sedangkan APM SLTA/Sederajat tercatat sebesar 50,43. Ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia SD/MI/Sederajat, ada 95 anak yang bersekolah dan anak yang bersekolah tepat pada jenjang pendidikan SD/MI/. Begitu juga halnya dengan partisipasi murni anak usia SLTP dan SLTA.

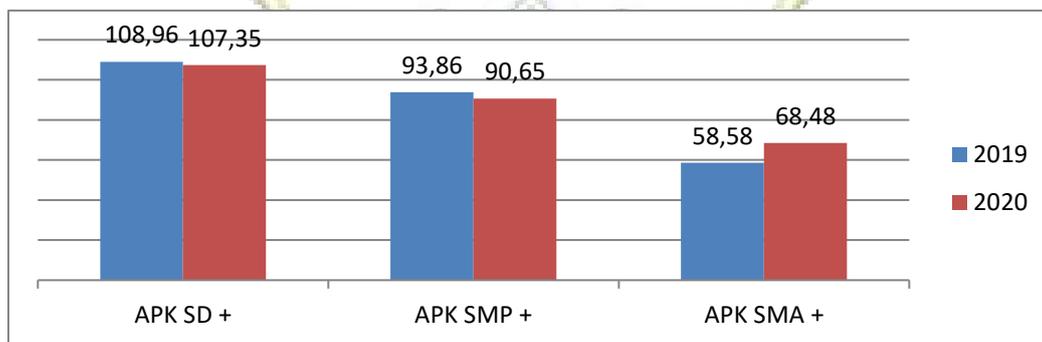
Tabel 1.9
Angka Partisipasi Murni
Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Pandeglang, Tahun 2019-2020



Sumber : Susenas Tahun 2019 - 2020

Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat tercatat sudah melampaui angka 100, yaitu mencapai angka 108,96. Hal ini menunjukkan program wajar dikdas 6 tahun sudah tercapai di kabupaten Pandeglang. Angka ini juga menunjukkan bahwa murid SD/MI/Sederajat yang bersekolah di Pandeglang cukup banyak yang usianya tidak tepat 7- 12 tahun. Ini terjadi karena adanya anak yang terlambat sekolah sehingga usia di atas 12 tahun masih duduk di bangku SD/MI/Sederajat. Selain itu, anak yang terlalu cepat disekolahkan oleh orangtuanya sehingga usia 5 atau 6 tahun sudah disekolahkan pada jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APK SLTP dan SLTA pada tahun 2019 tercatat masing-masing sebesar 93,86 dan 58,58.

Tabel 1.10
Angka Partisipasi Kotor Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Pandeglang, Tahun 2019-2020



Sumber : Susenas Tahun 2019-2020

Bila dibandingkan ketiga indikator partisipasi sekolah baik APS, APM maupun APK pada jenjang pendidikan SD, SLTP maupun SLTA dapat terlihat perbandingan antara anak yang bersekolah tepat pada usia sekolahnya. Untuk anak usia SD, APK lebih besar dibandingkan APS, ini menunjukkan bahwa anak yang usianya bukan usia SD tapi bersekolah di jenjang pendidikan SD/Sederajat lebih banyak dibandingkan anak usia SD yang bersekolah bukan di SD. Sedangkan anak usia SLTP dan SLTA juga sama.

FASILITAS PENDIDIKAN

Apabila berbicara tentang program pendidikan, hal yang paling penting adalah fasilitas pendidikan itu sendiri. Fasilitas pendidikan khususnya sarana berupa gedung merupakan hal yang penting karena merupakan tempat di mana terjadinya proses

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Selain itu ketersediaan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi dan berkualitas merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan suatu wilayah.

Jumlah Sarana Sekolah, Guru dan Siswa tahun ajaran 2019/2020 dapat dilihat pada **tabel 1.11** Tahun ajaran 2019/2020 rata-rata sekolah tingkat SD menampung 149,65 siswa dengan jumlah murid per guru rata-rata 16,16 orang dan sekolah Tingkat SLTP.

rata-rata menampung 201,97 siswa dengan jumlah murid rata-rata 12,49 orang per guru. Sedangkan untuk sekolah tingkat SLTA rata-rata menampung 250,62 siswa dengan rata-rata banyaknya murid per guru 14,13 orang.

Tabel 1.11

Jumlah Sekolah, Guru, Murid dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Sekolah
Kabupaten Pandeglang, Tahun 2020

Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD Sederajat	1.032	9.554	154.442	16,16	149,65
SLTP Sederajat	361	5.838	72.913	12,48	201,97
SLTA Sederajat	224	3.971	56.140	14,13	250,62

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang 2020

Dengan melihat rasio murid guru, keadaan ini dinilai sudah cukup baik bahkan jumlah guru untuk mengawasi murid cenderung berlebih.

Pada tahun ajaran 2019/2020 satu orang guru SD/MI mengajar atau mengawasi 16 sampai 17 orang siswa, satu orang guru SLTP mengajar atau mengawasi 16 sampai 17 orang siswa, satu orang guru SLTP mengajar atau mengawasi 12 sampai 13 orang siswa. Sedangkan satu orang guru SLTA mengajar atau mengawasi 14 sampai 15 orang siswa.

Bila dikaitkan dengan indikator pendidikan lainnya, terlihat ada hal yang cukup kontradiktif. Jumlah sekolah dan ketersediaan tenaga pengajar cukup banyak, namun partisipasi masyarakat terhadap sekolah tingkat SLTP dan SLTA masih cenderung



rendah. Ini mungkin menunjukkan bahwa program dari pemerintah sudah siap untuk melayani masyarakat dalam bidang pendidikan, namun respon masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi sehingga termotivasi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang SLTP dan SLTA, sedangkan untuk tingkat SD sudah cukup baik.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian dari kondisi di atas adalah apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut tingkat sebarannya sudah merata atau justru terkonsentrasi pada segmen-segmen tertentu, sehingga sebagian masyarakat pada wilayah- wilayah tertentu aksesnya masih sulit.

KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan yang digariskan dalam Sistem Kesehatan Nasional diarahkan agar jangkauan pelayanan kesehatan lebih luas dan merata sehingga dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat hidup lebih produktif, baik secara ekonomi maupun sosial.

Masalah kesehatan merupakan persoalan penduduk selama hidup, oleh karenanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan sangatlah penting. Bahkan pemerintah telah mengarahkan agar APBN/APBD lebih diprioritaskan ke sektor kesehatan selain pendidikan dasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat antara lain tersedianya sarana kesehatan, keadaan lingkungan yang memadai dan mutu makanan yang dikonsumsi. Penanganan faktor tersebut harus dilakukan terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang terkait.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi (AKB) dan angka harapan hidup (AHH). Selain itu aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan, yang antara lain diukur melalui angka kesakitan atau tingkat keluhan kesehatan.

Indikator Jumlah Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup merupakan indikator utama yang menunjukkan derajat kesehatan penduduk. Pada tahun 2018 Jumlah Kematian Bayi 0-12 bulan di Kabupaten Pandeglang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 186 menjadi 178 di tahun

2020. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pandeglang pada tahun 2021 relatif meningkat dari 64,24 tahun (tahun 2019) menjadi 64,49 tahun (tahun 2020). Angka ini memberi makna bahwa setiap bayi di kabupaten Pandeglang yang lahir pada tahun 2021 mempunyai harapan untuk hidup selama 64,04 tahun.

Tabel 1.12

Jumlah Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup Penduduk
Kabupaten Pandeglang Tahun 2014-2017

Indikator Derajat kesehatan	2018	2019	2020
Jumlah Kematian Bayi *)	214	186	178
Angka Harapan Hidup (tahun **)	64,04	64,24	64,49

Sumber : *) Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang

**) Penghitungan Metode Baru Susenas Tahun 2018-2020

Gambaran mengenai status kesehatan penduduk biasanya dapat dilihat melalui indikator Angka Kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan atau keluhan kesehatan sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari table 1.13 pada tahun 2021 sebanyak 15,13 persen penduduk mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggu aktivitasnya. Dibanding keadaan tahun sebelumnya, Angka Kesakitan cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 tercatat sebanyak 15,13 persen. Bila dibedakan berdasarkan gender, angka kesakitan penduduk laki-laki yaitu 14,75 persen lebih kecil dari pada penduduk perempuan yang sebesar 15,53 persen.

Tabel 1.13

Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lamanya Sakit Penduduk
Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

Indikator Kesehatan	2020		
	L	P	Total
Angka Kesakitan (%)	14,75	15,53	15,13
Rata-Rata Lamanya Sakit (hari)	4,25	3,26	3,60

Sumber: *Susenas Tahun 2020*

Rata-rata jumlah hari sakit atau terganggu aktivitas sehari-harinya pada tahun 2019 sebesar 3,60 hari. Rata-rata lamanya sakit penduduk laki-laki relatif lebih lama



dibandingkan penduduk perempuan. Ratarata lamanya sakit penduduk perempuan 3,26 hari dan penduduk laki-laki 4,25 hari.

PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN

Dalam era keterbukaan aparat pemerintah haruslah profesional dalam kinerjanya, terutama dalam mengantisipasi keadaan dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat, sehingga diharapkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak terdapat lagi di Kabupaten Pandeglang. Sikap aparat juga dipengaruhi oleh sistem, kelembagaan dan budaya masyarakat yang dilayani. Dengan demikian upaya perubahan dan pembahasan manajemen pemerintah harus lebih bersifat komprehensif dan integral.

Jumlah aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Pandeglang sampai akhir tahun 2021 sebanyak 9.772 ASN yang tersebar bekerja pada 68 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rincian Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, 11 OPD berupa Lembaga Teknis Daerah, 15 OPD berupa Dinas Daerah dan 35 OPD berupa Kecamatan serta 13 Kelurahan.

Tabel 1.14

Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah (PNS) Kabupaten Pandeglang
berdasar Golongan Ruang Tahun 2020

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
I	65	16	81
II	772	493	1.265
III	2.442	2.994	5.436
IV	1.420	1.570	2.990
Jumlah	4.699	5.073	9.772

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

Tabel 1.15

Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah (PNS) Kabupaten Pandeglang
berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

SD	SLTP	SLTA/D I	D2	D3	S1/DIV	S2/SIII
44	116	1.169	877	702	6.424	440

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

LINGKUNGAN

Wilayah Kabupaten Pandeglang memiliki luas sebesar 274.689 ha, yang terdiri dari hutan negara 56.501 ha, hutan rakyat 3.682,57 ha, lahan sawah 54.739 ha dan lainnya 136.409 ha. Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, pengelolaan wilayah hutan dilakukan dengan pola pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat sekitar hutan dapat sejahtera dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Demikian juga dengan pengelolaan lahan sawah yang harus memperhatikan lingkungan dan kearifan lokal.

1.4 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1.4.1. Struktur organisasi

Struktur organisasi unit-unit Pemerintah Kabupaten Pandeglang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang, terdiri dari
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan Kesehatan;
 - 3) Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan Sosial;



- 4) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang merupakan Satuan Polisi pamong Praja Tipe B yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe A , menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A , menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 9) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tipe B , menyelenggarakan urusan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 10) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe B , menyelenggarakan urusan Perindustrian, perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
- 11) Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan Pariwisata;
- 12) Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B, menyelenggarakan urusan Kepemudaan dan Olahraga;
- 13) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 14) Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Tipe B , menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian;
- 15) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 16) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe B , menyelenggarakan urusan Perumahan dan kawasan permukiman serta Pertanahan;



- 17) Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan Perhubungan;
 - 18) Dinas Ketahanan Pangan Tipe A , menyelenggarakan urusan Ketahanan Pangan;
 - 19) Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Penyuluhan;
 - 20) Dinas Perikanan Tipe B , menyelenggarakan urusan Kelautan dan Perikanan;
 - 21) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 22) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
5. Badan Daerah terdiri atas:
- 1) Badan Kepegawaian dan Diklat Tipe B merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset.
 - 4) Badan Pelayanan Pajak Daerah Tipe B merupakan unsur penunjang sebagian urusan pemerintahan bidang Keuangan dalam hal pajak daerah.
6. 35 Kecamatan ; dan
7. 13 Kelurahan dan 326 Desa.

1.4.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Pemerintah Kabupaten Pandeglang tercermin pada tugas-tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan tugas Bupati, sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut : membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, organisasi, dan tatalaksana, dan memberikan pelayanan administratif kepada seluruh



perangkat daerah, serta berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah lainnya, pembinaan generasi muda dan olah raga serta pembuatan LKIP tahunan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Daerah diberikan fungsi sebagai berikut mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah kabupaten, menyelenggarakan administrasi pemerintahan daerah, mengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah, pembinaan generasi muda dan melaksanakan pengumpulan serta pengelolaan data LKIP.

- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut: memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD, dan menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugas. Fungsi Sekretariat DPRD adalah: memfasilitasi rapat anggota DPRD, melaksanakan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD, dan mengelola tata usaha DPRD.
- c. Badan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Daerah di perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, kepegawaian, dan pengelolaan keuangan.
- d. Dinas Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut : menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Pandeglang dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
- e. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat. Camat melaksanakan dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati. Untuk dapat melaksanakan tugasnya camat mempunyai fungsi sebagai berikut: memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan informasi mengenai wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Bupati, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas yang berada di wilayah kerjanya, dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas Kelurahan dan Desa.



- f. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah. Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat. Untuk dapat melaksanakan tugasnya Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut: mendorong partisipasi masyarakat dan mengkoordinir penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya.

1.5 SISTEMATIKA LKjIP TAHUN 2021

Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------|--------------------------------|--|
| BAB I | : Pendahuluan | Menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP Tahun 2021 |
| BAB II | : Perencanaan Kinerja | Menjelaskan muatan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2021 dan perubahan perjanjian kinerja tahun 2021 |
| BAB III | : Akuntabilitas Kinerja | Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian akuntabilitas kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk dan pertanggungjawaban keuangan pada tahun 2021. |
| BAB IV | : Penutup | Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. |



Lampiran, berisi data pendukung dari LKIP Tahun 2021 yang terdiri dari :

1. Perjanjian Kinerja Kabupaten Pandeglang Tahun 2021;
2. Realisasi Anggaran Kabupaten Pandeglang Tahun 2021;
3. Penghargaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 sampai Tahun 2021.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis Kabupaten Pandeglang termuat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 22 September 2016. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu lima tahun yang memuat 1 (*satu*) Visi, 6 (*enam*) Misi, 8 (*delapan*) Sasaran, 30 (*tiga puluh*)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang harus dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang yang disajikan dalam LKIP Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 ini berupa visi, misi, tujuan, sasaran dan program/ kegiatan.

A. VISI

Visi dan misi merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya bagi masa mendatang yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Pandeglang untuk periode tahun 2016-2021 adalah: **“Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui transformasi harmoni agrobisnis, maritimbisnis dan wisatabisnis menuju rumah sehat dan keluarga sejahtera 2021”**

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Terwujudnya Pandeglang Berkah :

Merupakan wujud kebaikan yang bertambah dan berkesinambungan bagi segenap masyarakat Kabupaten Pandeglang sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan. Disamping itu juga, kata BERKAH merupakan *motto* yang berarti bahwa Kabupaten Pandeglang : Bersih, Elok, Ramah, Kuat, Aman dan Hidup, disingkat BERKAH.

(2) Transformasi Harmoni :

Merupakan perubahan yang selaras, serasi dan seimbang pada sistem tata kelola pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dengan jalinan kebersamaan dan kedamaian.

(3) Menuju Rumah Sehat :

Yaitu menuju kondisi daerah Kabupaten Pandeglang yang kondusif, masyarakatnya terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, akses informasi, sanitasi, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan secara baik.

(4) Menuju Keluarga Sejahtera :

Yaitu menuju suatu keadaan dimana telah berkurangnya jumlah masyarakat miskin, meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan dan daya beli masyarakat, serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Pandeglang yang maju dan mandiri.

B. M I S I

Visi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi sebagai berikut:

- (1) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
- (2) Membangun konektivitas wilayah;
- (3) Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian;
- (4) Meningkatkan nilai tambah sektor maritim;
- (5) Modernisasi pengelolaan potensi wisata;
- (6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat sistem inovasi daerah.

Keenam misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sebagai fondasi lahirnya masyarakat Pandeglang yang agamis, sehat, cerdas, bahagia dan peduli sesama;
- (2) Membangun konektivitas wilayah, dengan menjadikan pergerakan masyarakat yang dinamis guna mendorong aktivitas perekonomian yang berwawasan lingkungan;

- (3) Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, dengan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, melalui perubahan produksi bahan mentah pertanian bergerak menuju industri pertanian dalam kerangka agrobisnis;
- (4) Meningkatkan nilai tambah sektor maritim, dengan memperbaiki pengelolaan tradisional menuju pengelolaan lebih modern melalui pendekatan industri dan bisnis;
- (5) Modernisasi pengelolaan potensi wisata, dengan meningkatkan kualitas destinasi wisata, seni dan budaya, penguatan sumber daya manusia serta manajemen pengelolaan objek wisata;
- (6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat sistem inovasi daerah, dengan menerapkan birokrasi yang bersih dan melayani berbasis sistem data dan informasi, serta meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. TUJUAN

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan masyarakat yang Agamis, Sehat, Cerdas, Bahagia, dan Peduli Sesama;
- 2) Menjadikan pergerakan masyarakat yang dinamis guna mendorong aktivitas perekonomian;
- 3) Mengoptimalkan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 4) meningkatkan nilai tambah sektor pertanian;
- 5) Meningkatkan nilai tambah maritimbisnis;
- 6) Meningkatkan wisatabisnis;
- 7) Memperkuat Sistem Inovasi Daerah;
- 8) Meningkatkan tata kelola pemerintahan.

D. SASARAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Misi: *Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat*, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat;
 - b. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat;
 - c. Tertanggulangnya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Meningkatnya fungsi serta sarana dan prasarana perdagangan dan pasar;
 - e. Meningkatnya implementasi norma agama;
 - f. Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga;
 - g. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. Terkendalnya angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi;
 - i. Meningkatnya pemberdayaan koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah;
 - j. Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
2. Misi : *Membangun Konektivitas Wilayah*, dengan sasaran :
 - a. Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi untuk mendorong dan membangun konektivitas wilayah;
 - b. Terlaksananya pembangunan dan penataan, fasilitasi dan koordinasi untuk menjadikan aktivitas perekonomian lancar;
 - c. Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana prasarana khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan;
 - d. Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup.

3. Misi : *Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian*, dengan sasaran :
 - a. Tercapainya ketersediaan, dan peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian;
 - b. Meningkatnya jaringan kelembangan dan investasi industri pertanian;
 - c. Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Misi : *Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Maritim*, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pengelolaan dan produk maritimbisnis;
 - b. Meningkatnya sarana dan prasarana maritimbisnis.
5. Misi : *Modernisasi Pengelolaan Potensi Wisata*, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas kawasan/destinasi wisata;
 - b. Menguatnya SDM pelaku/masyarakat wisata;
 - c. Meningkatnya manajemen pengelolaan objek wisata.
6. Misi : *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Memperkuat Sistem Inovasi Daerah*, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kelembagaan, jaringan dan budaya inovasi;
 - b. Meningkatnya inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata;
 - c. Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani;
 - d. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah;
 - e. Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah;
 - f. Terciptanya masyarakat yang demokratis;
 - g. Terciptanya supremasi hukum;
 - h. Berkurangnya resiko bencana.

2.2. PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021

Dalam rangka mencapai tujuan, maka disusunlah sasaran strategis dengan indikator-indikator tertentu. Setiap tahunnya, target dari indikator sasaran strategis ini ditetapkan melalui perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.

Sehubungan dalam rangka pendampingan yang sedang dilaksanakan bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, dan ditemukan adanya ketidaksinkronan di Visi dan Misi, dari itu laporan yang kami sajikan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2021.

Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang mengacu pada sasaran strategis dan target Indikator Sasaran Strategis untuk tahun 2021 dapat dilihat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Bupati
Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
			TARGET	SATUAN
1.	Meningkatnya Akses Layanan PAUD	Prosentase penduduk Usia 0-6 yang mengikuti Pendidikan Usia Dini	45,35	%
2	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan SD Sederajat	Prosentase penduduk Usia 7-12 yang mengikuti Pendidikan Sekolah Dasar	99,41	%
3	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan SMP Sederajat	Prosentase penduduk Usia 7-12 yang mengikuti Pendidikan Sekolah Dasar	91,20	%
4	Meningkatkan Kelestarian kebudayaan Lokal	Presentase nilai-nilai kebudayaan yang dilestarikan	94,14	%
5	Meningkatkan prosentase kompetensi tenaga kependidikan	prosentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikasi kompetensi	100	%
Sasaran ini didukung oleh program:				



NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773.719.635.930	DISDIKBUD
Program Pengelolaan Pendidikan	235.696.364.000	DISDIKBUD
Program pengembangan kurikulum,	20.000.000	DISDIKBUD
Program pendidik dan tenaga kependidikan	175.000.000	DISDIKBUD
Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan	40.000.000	DISDIKBUD
Program Pembinaan Sejarah	25.000.000	DISDIKBUD
Program Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	180.000.000	DISDIKBUD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
2. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat	Angka Harapan Hidup	65.39	Tahun
	Angka Kesakitan	21.51	%
	Rata-rata lama sakit	4,15	Hari
	Persentasi Balita Gizi Buruk	0.66	%
	Indeks Angka Harapan Hidup /Indeks Kesehatan	68,34	Indeks
	PDRB ADHB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	384.895	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	222,725	%
	Indek Angka Harapan Hidup/ Indek Kesehatan	65,39	Indeks
Sasaran ini didukung oleh program:			
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.494.453	DINKES	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1148.282.608.406	DINKES	
Program peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	150.000.000	DINKES	
Program Kediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman	355.783.000	DINKES	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
			TARGET	SATUAN
3.	Tertanggulangnya Kemiskinan dan Pengangguran yang Diprioritaskan Pada Kantong- kantong Kemiskinan dengan Memprioritaskan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin	99,619	Jiwa
		Persentasi Penduduk di bawah Garis Kemiskinan	7,45	%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	8,06	%
		Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	63,59	Indeks
		Indeks Gini Rasio	0,18	Indeks
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.080.867.156	DINSOS	
Program Pemberdayaan Sosial		335.610.000	DINSOS	
Program Penanganan WN Migran Korban Tindak Kekerasa		5.000.000	DINSOS	
Program Rehabilitasi Sosial		397.454.500	DINSOS	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		7.688.735.000	DINSOS	
Program Penanganan Bencana		351.892.900	DINSOS	
Program Pengelola Taman Makan Pahlawan		20.000.000	DINSOS	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
			TARGET	SATUAN
4.	Meningkatkannya Fungsi Serta Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Pasar	Tingkat Inflasi	8,30	%
		PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.853.035	Rp. Juta
		PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	91.100	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2. 657.850	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Jasa Perusahaan	48.629	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,91	%
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor JasaPerusahaan	0,85	%
		Sasaran ini didukung oleh program:		
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM Berbasis Agro	18,250,000.00	DISPERINDAG	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	18,250,000.00	DISPERINDAG	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1,000,158,000.00	DISPERINDAG	
	Program Pembangunan/ Pengembangan Sentra-sentra	1,000,158,000.00	DISPERINDAG	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
			TARGET	SATUAN
5.	Meningkatnya Implementasi Norma Agama	Jumlah Fasilitasi/ Bantuan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keagamaan	100	Lembaga / Organisasi
		Tidak Terjadinya Konflik Umat Beragama Skala Provinsi dan Nasional	-	Kali
		Jumlah Pembinaan, Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	91	Kali
		Angka Partisipasi Sekolah MI / SD Sederajat	100,00	%
		Angka Partisipasi Murni MI / SD Sederajat	98,44	%
		Angka Partisipasi Kasar MI / SD Sederajat	100,00	%
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,90	Tahun
		Indeks Pendidikan	65,62	Indeks
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.864.883.843	SETDA	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12.032.400.400	SETDA	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.269.875.000	SETDA	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
6. Meningkatnya Kapasitas Pemuda Berprestasi dan Sarana Olahraga	Juara Olahraga Tingkat Provinsi / Nasional	3	Cabang
	Pembangunan dan Pemanfaatan GOR Multiguna Sebagai Gedung Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	2	Unit
	Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan	5	Penghargaan
	Jumlah Fasilitas Pengembangan Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	20	Fasilitas / Kegiatan
	Jumlah Fasilitas Olahraga	11	Unit
Sasaran ini didukung oleh program:			
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Keolahragaan	2.650.000.300	DISPORA	
Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	3612.000.000	DISPORA	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
7. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100,00	%
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di PUSKESMAS mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	100,00	%
	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	90,00	%
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	100,00	%
Sasaran ini didukung oleh program:			
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	76.569.000	DP2KBP3A
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	80.231.000	DP2KBP3A
	Program Pemenuhan Hak Anak	125.000.000	DP2KBP3A
	Program Perlindungan Khusus Anak	90.000.000	DP2KBP3A
	Program Pengendalian Penduduk	120.514000	DP2KBP3A
	Program Pembinaan KB	10.202.437.000	DP2KBP3A
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	958.400.000	DP2KBP3A



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
8. Terkendalinya Angka Kelahiran dengan Meningkatkan Kualitas Reproduksi	Jumlah Penduduk	1.336.515	Jiwa
	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,15	%
	Jumlah Rumah Tangga	388.515	KK
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun 3,5%	100,00	%
	Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%.	100,00	%
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak Terpenuhi (Unmet Need) 5%	100,00	%
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB 70%	100,00	%
	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	100,00	%
	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100,00	%
	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu)petugas di setiap Desa/ Kelurahan.	100,00	%
	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat 30% Setiap Tahun	100,00	%
	Data Mikro Keluraga di setiap Desa/Kelurahan 100% di SetiapTahun	100,00	%
	Sasaran ini didukung oleh program:		
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Keluarga Berencana	11,123,015,434.00	DP2KBP3A	
Program Pemberdayaan Keluarga	100.875.000,00	DP2KBP3A	
Program Ketahanan Keluarga	190,773,750.00	DP2KBP3A	



Program Advokasi Dan Kie Keluarga Sejahtera	156.065.000,00	DP2KBP3A
Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR	58,502,500.00	DP2KBP3A

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
9. Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah	Terselenggaranya Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Kerjasama Kemitraan AntaraUMKM Tingkat Kabupaten dengan pengusaha Tingkat Provinsi/Nasional	1	1 kali / tahun
	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1.787.882	Rp. Juta
	PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, danReparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.853.035	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1.278.875	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, danReparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.657.850	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	0,73	%
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,91	%
	Indeks Tingkat Daya Beli/Pengeluaran	63,59	Indeks
	Sasaran ini didukung oleh program:		
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pelayanan Perijinan Usaha Simpan Pinjam	169.000.000	DISKOP&UMKM	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	10.000.000	DISKOP&UMKM	



Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	145.455.000	DISKOP&UMKM
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	25.000.000	DISKOP&UMKM
Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	40.000.000	DISKOP&UMKM
Program Pemberdayaan dan Perlindungan	37.500.000	DISKOP&UMKM
Program Pengembangan UMKM	343.264.000	DISKOP&UMKM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
10. Meningkatkan Etos Kerja dan Produktivitas Masyarakat	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	100,00	%
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	100,00	%
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	100,00	%
	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	90,00	%
	Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	100,00	%
Sasaran ini didukung oleh program:			
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	210.934.000	DISNAKERTRAN
	Program Penempatan Tenaga Kerja	35.250.000	DISNAKERTRAN
	Program Hubungan Industrial	48.550.000	DISNAKERTRAN
	Program Pengembangan Lembaga Transmigrasi	70.125.500	DISNAKERTRAN



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
			TARGET	SATUAN
11.	Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Untuk Mendorong dan Membangun Konektivitas	PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	2.685.511	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan	1.422.555	Rp. Juta
		Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	96,00	%
		Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	94,00	%
		Tersedianya Halte pada Setiap Kabupaten/Kota yang Telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	100,00	%
		Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang pada Setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	90,00	%
		Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka dan Guardrail) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Jalan Kabupaten/Kota	94,00	%
		Rasio Elektrifikasi	100,00	%
		PDRB ADHB Sektor Pertambangan & Penggalian	3.561.478	Rp. Juta
		PDRB ADHB Sektor Listrik dan Gas	631.270	Rp. Juta
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Penyelenggaraan LLAJ	1.514.900.000	DISHUB	
	Program Pelayaran	5.000.000	DISHUB	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
12. Terlaksananya Pembangunan dan Penataan, Fasilitasi dan Koordinasi untuk Menjadikan Aktivitas Perekonomian Lancar	Media Massa Seperti Majalah, Radio dan Televisi	12,00	Kegiatan
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Baru seperti Website (media online)	365,00	Hari
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Tradisional Seperti Pertunjukan Rakyat	12,00	Kegiatan
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Interpersonal seperti Sarasehan, Ceramah/Diskusi dan Lokakarya	12,00	Kegiatan
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Luar Ruang Seperti Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho	12,00	Kegiatan
	Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangannya	70,63	%
	PDRB ADHK Sektor Informasi dan Komunikasi	100.067	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Informasi dan Komunikasi	0,32	%

Sasaran ini didukung oleh program:

NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	4,097,321,000.00	DISPERKIM



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
13. Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Khususnya Jalan Menuju Kawasan Agribisnis, Destinasi Pariwisata dan Pusat Pemerintahan Kecamatan	Kondisi jalan		
	a. Baik	49,28	%
	b. Sedang	26,11	%
	c. Buruk	11,46	%
	d. Rusak Berat	13,15	%
	PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	2,685,511	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan	1,422,555	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Transportasi dan Pergudangan	1,58	%
	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten/Kota Baik dan Sedang	75,38	%
	Persentase Terhubungnya Pusat-pusat Kegiatan dan Pusat Produksi di Wilayah Kabupaten/Kota	100,00	%
	PDRB ADHB Sektor Bangunan	2,140,674	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Bangunan	1,258,501	Rp. Juta
	Sasaran ini didukung oleh program:		
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	26.657.677.966	DINAS PUPRR	
Program Penataan Gedung dan Bangunan	4.719.212.000	DINAS PUPRR	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.626.000.000	DINAS PUPRR	
Program Penyelenggaraan Jalan	42.864.048.000	DINAS PUPRR	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	50.000.000	DINAS PUPR	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
14. Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Kawasan, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Serta Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air	92,98	%
	Minum yang Aman	68,17	%
	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	23,22	%
	Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan	79,07	%
	Persentase Pengangkutan Sampah	79,07	%
	Persentase pengoperasian TPA	70	%
	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) Lebih dari 2 Kali Setahun	57,29	%
	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang Diterbitkan	68,17	%
	Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu Penerbitan Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap	100	%
	Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta Digital	100,00	%
	Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20%	90,00	%
	PDRB ADHB Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.436	Rp. Juta
	Sasaran ini didukung oleh program:		
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	



Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	650.000.000	DINAS PUPR
Program Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.788.625.772	DINAS PERKIM DAN PERTANAHAN
Program Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.611.826.580	DINAS PERKIM DAN PERTANAHAN
Program Urusan Bidang Pertanahan	3.481.721.020	DINAS PERKIM DAN PERTANAHAN





SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
			TARGET	SATUAN
15.	Tercapainya ketersediaan, dan Peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.667.582	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.715.702	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	%
		Nilai Tukar Petani	102,89	Indeks
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	472.388.000	DINAS PERTANIAN	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	34.891.065.000	DINAS PERTANIAN	
	Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	110.000.000	DINAS PERTANIAN	
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	73.000.000	DINAS PERTANIAN	
	Program Perizinan Usaha Pertanian	39.612.000	DINAS PERTANIAN	
	Program Penyuluhan Pertanian	2.378.800.000	DINAS PERTANIAN	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
			TARGET	SATUAN
16.	Meningkatnya Jaringan Kelembagaan dan Investasi Industri Pertanian	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.667.582	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.715.702	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	%
		Nilai Tukar Petani	102,89	Indeks
		PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1.787.882	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1.278.875	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	0,73	%
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Pengembangan Kelembagaan, Sdm Dan Penyuluhan	504,280,000.00	DINAS PERTANIAN	
	Program Perluasan Jaringan Bisnis Dan Pasar Produk Pertanian	60,985,000.00	DINAS PERTANIAN	
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri/ Usaha Potensial	1,000,158,000.00	DINAS PERTANIAN	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021		
		TARGET	SATUAN	
17. Meningkatkan ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.667.582	Rp. Juta	
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.715.702	Rp. Juta	
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	%	
	Nilai Tukar Petani	102,89	Indeks	
	Ketersediaan energi dan protein perkapita	100,00	%	
	Penguatan cadangan pangan	93,11	%	
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100,00	%	
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	100,00	%	
	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100,00	%	
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100,00	%	
	Penanganan daerah rawan pangan	93,11	%	
	Sasaran ini didukung oleh program:			
		NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan masyarakat	250.557.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	175.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	125.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
18. Meningkatkan pengelolaan dan produk maritimbisnis	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14.316.970	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.857.087	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,47	%
	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1.939.524	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1.330.739	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	0,73	%
Sasaran ini didukung oleh program:			
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengolahan dan Pemasaran Dan Hasil Perikanan	170.000.000	DINAS PERIKANAN	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	425.051.000	DINAS PERIKANAN	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.115.887.000	DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
			TARGET	SATUAN
19.	Meningkatnya sarana dan prasarana maritimbisnis	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.667.582	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.715.702	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	%
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERIKANAN TANGKAP		1,484,473,000.00	DINAS PERIKANAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA		109,615,000.00	DINAS PERIKANAN	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
			TARGET	SATUAN
20.	Meningkatnya kualitas kawasan/destinasi wisata	Jumlah Wisatawan	6.504.095	Orang
		Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	1,34	Hari
		PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	462.681	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	227.467	Rp. Juta
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya		4.822.064.825.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata		1.602.238.000	DINAS PARIWISATA	
Program Pemasaran Pariwisata		130.000.000	DINAS PARIWISATA	
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		198.000.000	DINAS PARIWISATA	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
			TARGET	SATUAN
21.	Menguatnya SDM Pelaku/masyarakat Wisata	Jumlah Wisatawan	6,504,095	Orang
		Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	1,34	Hari
		PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	462.681	Rp.Juta
		- PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	227.487	Rp.Juta
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengembangan Informasi Dan Promosi Pariwisata		161,707,500.00	DINAS PARIWISATA	





SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
			TARGET	SATUAN
22.	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Objek Wisata	Jumlah Wisatawan	6,504,095	Orang
		Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	1,34	Hari
		PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	462.681	Rp.Juta
		PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	227.467	Rp.Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Lainnya	2,84	%
		Cakupan kajian seni 50%	100,00	
		Cakupan fasilitasi seni 30%	100,00	
		Cakupan gelar seni 75%	100,00	
		Misi kesenian 100%	100,00	
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	100,00	
		Cakupan tempat 100%	100,00	
		Cakupan organisasi 34%	100,00	
		Sasaran ini didukung oleh program:		
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Penciptaan Dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	496,228,000.00	DINAS PARIWISATA	
	Program Sarana Dan Prasarana Wisata	84,115,000.00	DINAS PARIWISATA	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
23. Meningkatkan kelembagaan, jaringan dan investasi industri pertanian	PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan	1,434,786	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan	777,622	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Pendidikan	5,12	%
	Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	63,59	Indeks
Sasaran ini didukung oleh program:			
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	Program Pengembangan Kelembagaan, Sdm Dan Penyuluhan	504,280,000.00	DINAS PERTANIAN
	Program Perluasan Jaringan Bisnis Dan Pasar Produk Pertanian	60,985,000.00	DINAS PERTANIAN
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri/ Usaha Potensial	1,000,158,000.00	DINAS PERTANIAN



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
			TARGET	SATUAN
24.	Meningkatnya inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	12.667.582	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	5.715.702	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	%
		PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1.939.524	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1.330.739	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor industri pengolahan	0,73	%
		Nilai Tukar Petani	102,89	Indeks
		Sasaran ini didukung oleh program:		
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Pengembangan Kelembagaan, Sdm Dan Penyuluhan	504,280,000.00	DINAS PERTANIAN	
	Program Perluasan Jaringan Bisnis Dan Pasar Produk Pertanian	60,985,000.00	DINAS PERTANIAN	
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri/ Usaha Potensial	1,000,158,000.00	DINAS PERTANIAN	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021		
		TARGET	SATUAN	
25	Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani	Implementasi Maturitas Level SPIP	Level 3	Level
		Kapabilitas APIP	Level 3 D Ct	Level
		Opini LKPD	WTP	Tingkat
		Nilai SAKIP	BB	Nilai
		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas pelayanan publik	82,00	%
		Rata-rata Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal	90,53	%
		PDRB ADHB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3.006.082	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	15,89	%
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	365,00	hari
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	12,00	kegiatan
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	12,00	kegiatan



Sasaran ini didukung oleh program:			
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	52.407.146.750	SETWAN
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	533.403.000	DISKOMSANTIK
	Program Aplikasi Informatika	430.000.000	DISKOMSANTIK
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorar	239.828.000.000	DISKOMSANTIK
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasui	100.000.000	DISKOMSANTIK
	Program Kepegawaian Daerah	1.532.501.900	BKD
	Program Pengembangan SDM Aparatur	3.925.357.000	BKD



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
			TARGET	SATUAN
26	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Opini LKPD	WTP	Tingkat
		Peningkatan Pendapatan Daerah	229.068.19 2.270,00	Rp. Milyar
		Persentase kenaikan PAD	125,00	%
		Alokasi anggaran untuk pembangunan	899.000.00 0.000	Rp. Milyar
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8,503,475,486.00	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	
Program Pengelolaan Pendapatan daerah		733,300,000.00	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		408.420.692.930	BPKD	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.630.285.750	BPKD	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48.683.620.148	BPKD	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
27 Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah	PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	91.100	Rp. Juta
	PDRB ADHB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	849.128	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor jasa perusahaan	0,85	%
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	3,34	%
	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	12.667.582	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	%
	Kemampuan Investasi	650,02	Rp. Miliar
Sasaran ini didukung oleh program:			
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	45.000.000	DPMPTSP	
Program Promosi Penanaman Modal	30.000.000	DPMPTSP	
Program Pelayanan Penanaman Modal	52.000.000	DPMPTSP	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	77,220,000.00	DPMPTSP	
Program Pengendalian data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	50.000.000	DPMPTSP	
Retribusi Perijinan Tertentu	1.554.270.000	DPMPTSP	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021		
		TARGET	SATUAN	
28	Terciptanya masyarakat yang demokratis	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik	82,00	%
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	365,00	hari
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	12,00	kegiatan
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	12,00	kegiatan
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan	94,00	%
		Tidak terjadinya konflik bernuansa suku, ras dan antargolongan, konflik politik, konflik perebutan sumber daya alam, diskriminasi, dan kekerasan lain yang merusak fasilitas publik, serta tindakan terorisme	-	Kali
		Tingkat Partisipasi Politik Pemilu	68,96	%
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	4.411.825.000	DPMPD	
	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik	1,446,355,000.00	KESBANGPOL	
	Program Fasilitasi Pembinaan Ketahanan dan Kewaspadaan Masyarakat	193,897,900.00	DNAS KETAHANAN PANGAN	
	Program penguatan Ideologi pancasila dan Karakter kebangsaan	120,000,000.00	BADAN KESBANGPOL	



Program peningkatan Peran partai politik Dan lembaga pendidikan Melalui pendidikan Politik dan Pengembangan etika Serta budaya politik	1,644,120,970.00	BADAN KESBANGPOL
Program pemberdayaan Dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	350.000.000	BADAN KESBANGPOL

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
			TARGET	SATUAN
29	Terciptanya Supremasi hukum	Implementasi Maturitas Level SPIP	Level 3	Level
		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) diKabupaten/Kota	98,45	%
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten/ Kota	95,64	%
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	100,00	%
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100,00	Patroli/hari/orang
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.701.712.686	SATPOL PP	
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	480.000.000	SATPOL PP	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
			TARGET	SATUAN
30	Pengurangan Risiko Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	98,45	%
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	95,64	%
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	99,75	%
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK	100,00	%
		Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	93,11	%
		Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	97,91	%
		Evakuasi korban bencana skala provinsi	97,91	%
		Sasaran ini didukung oleh program:		
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	4.494.029.642	BPBD	
	Program Penunangan Bencaqna	22.189.421.570		

Untuk penjelasan lebih lanjut kami sampaikan dalam dokumen capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KABUPATEN PANDEGLANG

Akuntabilitas kinerja pada hakekatnya menggambarkan hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk fasilitasi atas pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat.

Pada bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang mencakup capaian kinerja sasaran strategis berdasarkan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021. Capaian Indikator sasaran strategis merupakan capaian indikator makro, indikator kinerja dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator sasaran strategis yang merupakan pencapaian dari rata-rata pelaksanaan outcome/output dari program/kegiatan yang terhimpun berdasarkan sasaran strategis yang ada di RPJMD. Indikator Kinerja Makro Pembangunan merupakan indikator kinerja yang dihasilkan/ distimulasi dari beberapa variabel yang saling terkait antara lain kinerja pemerintahan, swasta, dan partisipasi masyarakat. Selain itu capaian indikator makro ini dapat diperbandingkan antar Pemerintah Daerah yang lain, karena umumnya indikator kinerja makro ini juga digunakan secara seragam oleh Pemerintah Daerah lainnya.

Gambaran organisasi publik yang sehat tercermin dari tingkat capaian kinerja yang optimal yang diukur dari indikator kinerja yang terukur sesuai dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan. Tahun 2018 ini merupakan momentum yang penting bagi Kabupaten Pandeglang untuk tetap berkomitmen menunjukkan kesungguhan kerjanya bagi terselenggaranya pemerintahan yang melayani bagi seluruh elemen masyarakat dan mewujudkan pembangunan Kabupaten Pandeglang pada umumnya secara holistik.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang sudah tercantum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

NO	NILAI	KATEGORI PERINGKAT	INTERPRESTASI
1	>85 -100	AA	Memuaskan
2	>75-85	A	Sangat Baik
3	>65-75	B	Baik
4	>50-65	CC	Cukup Baik (Memadai)
5	>30-50	C	Agak Kurang
6	0-30	D	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

- Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.



3.1.1.1 Perjanjian Kinerja Ke satu : Meningkatkan Aksebilitas Pelayanan Pendidikan Kepada Seluruh Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1. Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Kepada Seluruh Masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah			97,125	97,125		97,2	97,2
	a. SD Sederajat	%	100	99,65	99,65	100	99,7	99,7
	b. SMP Sederajat	%	100	94,60	94,60	100	94,7	94,7
	Angka Partisipasi Murni			100,03	100,03			96,83
	a. SD Sederajat	%	94,79	94,83	100,04	98,55	95,2	96,60
	b. SMP Sederajat	%	74,96	74,98	100,02	77,37	75,1	97,06
	Angka Partisipasi Kasar			101,42	101,41			102
	a. SD Sederajat	%	100	108,98	108,98	100,00	94,91	94,91
	b. SMP Sederajat	%	83,84	93,86	111,95	86,27	94,12	109,09
	Angka Melek Huruf	%	100	96,69	96,69	100	98,01	98,01
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,90	7,1	89,87	8,19	7,6	92,79
	Indeks Pendidikan	Indeks	65,62	59,72	91,02	66,99	62,2	92,84
	PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan	Rp. Juta	1,434,766	1.300.000	90,60	1,665,671	1,099,305.50	65,99
PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan	Rp. Juta	777,622	750.000	96,44	842.000	685,163	81,37	

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 8 (*Delapan*) indikator sasaran strategis dengan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 90,87 %

3.1.1.2 Perjanjian Kinerja Ke dua : *Meningkatnya Kualitas dan Aksebilitas Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
2. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,39	64,49	98,62	65,77	64,79	98,50
	Angka Kesakitan	%	20,51	15,13	73,76	20,15	15,13	75,08
	Rata-rata lama sakit	Hari	4,15	3,60	86,74	3,73	3,60	96,51
	Persentasi Balita Gizi Buruk	%	0,66	0,88	133,33	0,58		
	Indeks Angka Harapan Hidup / Indeks Kesehatan	Indeks	68,34	67,75	99,136	66,62	67,	
	PDRB ADHB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	Rp. Juta	384,895	284.020	73,79	441,675	309,843	70,15

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 6 (*enam*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **94,23%**



3.1.1.3 Perjanjian Kinerja Ke tiga : *Tertanggulangnya Kemiskinan dan Pengangguran yang Diprioritaskan pada Kantong-Kantong Kemiskinan dengan Memprioritaskan Pemberdayaan Masyarakat*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
3. Tertanggulangnya Kemiskinan dan Pengangguran yang Diprioritaskan Pada Kantong-kantong Kemiskinan dengan Memprioritaskan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	99,619	114,090	87,31	96,421	120.440	124,91
	Persentasi Penduduk di bawah Garis Kemiskinan	%	7,45	9,42	79,08	7,13	9,92	71,875
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,06	8,71	92,53	7,08	9,18	77,12
	Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	Indeks	63,59	65,95	103,71	63,86	40,41	63,27
	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,18	0,379	47,49	0,17	0,305	55,73

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 5 (*lima*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **78,81 %**



3.1.1.4 Perjanjian Kinerja Ke empat : Meningkatkan Fungsi Serta Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Pasar

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
4. Meningkatkan Fungsi Serta Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Pasar	Tingkat Inflasi	%	8,30	0,70	8,43	8,40	0,31	2,70
	PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	3,853,035	837.938	24,19	4,286,988	3,311,608	77,24
	PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	Rp. Juta	91,100	16,558	18,5	104,186	66,058	63,41
	PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	2,657,850	2.573.390	94,95	2,807,751	2,520,566	89,77
	PDRB ADHK Sektor Jasa Perusahaan	Rp. Juta	48,629	46,69	95,57	51,126	46,279	90,51

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 5 (*lima*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 64,726%

3.1.1.5 Perjanjian Kinerja Ke lima : *Meningkatnya Implementasi Norma Agama*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
5. Meningkatnya Implementasi Norma Agama	Jumlah Fasilitas/ Bantuan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keagamaan	Lembaga / Organisasi	100	68	68	100	142	142
	Tidak Terjadinya Konflik Umat Beragama Skala Provinsi dan Nasional	Kali	0	0	100	0	0	100
	Jumlah Pembinaan, Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	Kali	91	4	4,39	91	2	2,19
	Angka Partisipasi Sekolah MI / SD Sederajat	%	100	99,47	99,47	100	99,7	99,7
	Angka Partisipasi Murni MI / SD Sederajat	%	98,44	94,89	96,55	98,66	95,2	96,49
	Angka Partisipasi Kasar MI / SD Sederajat	%	100	107,35	107,35	100	94,91	94,91
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,90	6,96	83,54	8,19	7,6	92,79
	Indeks Pendidikan	Indeks	65,62	59,72	91,00	66,99	62,2	92,84

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 8 (*delapan*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kerjanya adalah 90,11%

3.1.1.6 Perjanjian Kinerja Ke enam : *Meningkatnya Kapasitas Pemuda Berprestasi dan Sarana Olahraga*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
6. Meningkatnya Kapasitas Pemuda Berprestasi dan Sarana Olahraga	Juara Olahraga Tingkat Provinsi / Nasional	Cabang	3	10	333,33	3	3	100
	Pembangunan dan Pemanfaatan GOR Multiguna Sebagai Gedung Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	Unit	2	1	50	2	1	50
	Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan	Penghargaan	5	10	200	5	15	300
	Jumlah Fasilitas Pengembangan Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	Fasilitas / Kegiatan	20	4	20	20	5	25
	Jumlah Fasilitas Olahraga	Unit	11	17	154,54	11	3	27,27

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 5 (*lima*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 100,454 %

3.1.1.7 Perjanjian Kinerja Ke tujuh : *Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
7. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di PUSKESMAS mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	%	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	90	75	83,33	100	75	75
	Cakupan Perempuan & Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100	75	75	100	75	75

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 4 (*empat*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kerjanya adalah 87,5 %

3.1.1.8 Perjanjian Kinerja Ke delapan : *Terkendalinya Angka Kelahiran dengan meningkatkan Kualitas Reproduksi*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
8 Terkendalinya Angka Kelahiran dengan Meningkatkan Kualitas Reproduksi	Jumlah Penduduk	Jiwa	1,336,476	1.211.909	91,71	1,351,525	1.272.687	94,166
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,15	0,56	205,35	1,13	0,99	114,14
	Jumlah Rumah Tangga	KK	388.515	353.185	90,90	393.682	265.557	148,247
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun 3,5%	%	100	5,35	65,42	100	1,04	336,53
	Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%.	%	100	73,60	73,60	100	77,26	77,26
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak Terpenuhi (Unmet Need) 5%	%	100	14,65	14,65	100	12,69	39,40
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB 70%	%	100	80,98	80,98	100	90,15	90,15



Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	%	100	76,08	76,08	100	42,95	42,95
Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	%	100	20,64	20,64	100	23,59	23,59
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu)petugas di setiap Desa/ Kelurahan.	%	100	100	100	100	100	100
Cakupan Penyediaan Alat dan Obat untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat 30% Setiap Tahun	%	100	100	100	100	100	100
Data Mikro Keluraga di setiap Desa/Kelurahan 100% di SetiapTahun	%	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **12 (duabelas)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **105.53%**

3.1.1.9 Perjanjian Kinerja Ke sembilan : *Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
9. Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah	Terselenggaranya Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Kerjasama Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) Tingkat Kabupaten/Kota dengan Pengusaha Tingkat Provinsi/ Nasional	1 kali / tahun	1	1	100	1	1	100
	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1.787.882	1.660.920	92,90	1.939.524	1,716,131	88,48
	PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	3.853.035	3.311.650	85,94	4.266.988	3,311,608	77,609
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1,278,875	1.293.390	101,13	1,330,739	1,303,382	97,944



	PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	2,657,850	2.573.390	96,82	2,807,751	2.600.000	92,60
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	%	0,73	0,72	98,63	0,73	0,71	97,26
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	3,91	1,42	36,57	3,91	1,41	36,06
	Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	Indeks	63,59	65,95	103,37	63,86	66,01	103,36

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **8 (delapan)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **86,66 %**

3.1.1.10 Perjanjian Kinerja Ke sepuluh : *Meningkatnya Etos Kerja dan Produktivitas Masyarakat*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
10. Meningkatnya Etos Kerja dan Produktivitas Masyarakat	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	100	128	128	100	112	112
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	100	0	0	100	0	0
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	100	0	0	100	33,333	33,33
	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	%	90	9,13	10,14	100	15	15
	Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	100	35	35	100	75	75

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 4 (*empat*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 58,83%



3.1.1.11 Perjanjian Kinerja Ke sebelas : Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi untuk Mendorong dan membangun Konektivitas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
11. Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Untuk Mendorong dan Membangun Konektivitas	PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	Rp. Juta	2,685,511	1.645.350	61,26	3,162,848	1,644,158	51,98
	PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan	Rp. Juta	1,422,555	1.207.960	84,91	1,532,088	1.181,765	77,134
	Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	96	100	104,16	100	100	100
	Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	94	100	106,38	100	100	100



	Tersedianya Halte pada Setiap Kabupaten/Kota yang Telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	%	100	80	80	100	85	85
	Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang pada Setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	%	90	78	83,33	100	80	80
	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka dan Guardrail) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Jalan Kabupaten/Kota	%	94	80	85,10	100	85	85
	PDRB ADHB Sektor Pertambangan & Penggalian	Rp. Juta	3,561,476	2.475.890	69,51	3,924,893	2,312,533	58,91
	PDRB ADHB Sektor Listrik dan Gas	Rp. Juta	631.270	191.420	30,32	907.027	176,440	19,45

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **9 (sembilan)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **73,05 %**

3.1.1.12 Perjanjian Kinerja Ke duabelas : *Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi untuk Mendorong dan membangun Konektivitas*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
12. Terlaksananya Pembangunan dan Penataan, Fasilitasi dan Koordinasi untuk Menjadikan Aktivitas Perekonomian Lancar	Media Massa Seperti Majalah, Radio dan Televisi	kegiatan	12	12	100	12	12	100
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Baru seperti Website (Media online)	hari	365	365	100	365	365	100
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Tradisional Seperti Pertunjukan Rakyat	kegiatan	12	12	100	12	12	100
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Interpersonal seperti Sarasehan, Ceramah/Diskusi dan Lokakarya	kegiatan	12	12	100	12	12	100



	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Luar Ruang Seperti Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho	kegiatan	12	12	100	12	12	100
	Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangannya	%	70,63	85	120,3	71,25	86	120,70
	PDRB ADHK Sektor Informasi dan Komunikasi	Rp. Juta	100,067	91.780	91,71	110,165	92,760	84,20
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Informasi dan Komunikasi	%	0,32	0,31	96,87	0,31	0,32	103,22

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **8 (delapan)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **101.015%**



3.1.1.13 Perjanjian Kinerja Ke tigabelas : *Terlaksananya Pembangunan dan Peingkatan Sarana Prasarana Khususnya Jalan Menuju Kawasan Agribisnis, Destinasi Pariwisata dan Pusat Pemerintahan Kecamatan*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
13. Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Khususnya Jalan Menuju Kawasan Agribisnis, Destinasi Pariwisata dan Pusat Pemerintahan Kecamatan	Kondisi jalan				73,65			119,92
	a. Baik	%	49,28	46,77	94,90	53,56	49,19	91,84
	b. Sedang	%	26,11	12,79	48,98	24,22	12,92	53,34
	c. Buruk	%	11,46	11,98	104,53	10,52	11,33	107,69
	d. Rusak Berat	%	13,15	28,46	46,20	11,71	26,56	226,81
	PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	Rp. Juta	2,685,511	1.645.350	61,26	3,162,848	1,644,158	51,99
	PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan	Rp. Juta	1,422,511	1.207.960	84,91	1,532,088	1,181,765	77,13
	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten/Kota Baik dan Sedang	%	75,38	59,56	79,01	77,77	62,11	79,86
	Persentase Terhubungnya Pusat-pusat Kegiatan dan PusatProduksi di Wilayah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100
	PDRB ADHB Sektor Bangunan	Rp. Juta	2,140,674	1.511.070	70,58	2,491,342	1.610.000	74,62
PDRB ADHK Sektor Bangunan	Rp. Juta	1,258,601	1.091.320	86,70	1,366,160	1.110.00	81,24	

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 7 (*tujuh*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **83,53%**



3.1.1.14 Perjanjian Kinerja Ke empatbelas : *Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Kawasan, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Serta Pelestarian Lingkungan Hidup*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
14. Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Kawasan, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Serta Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	%	92,98	92,98	100	100	93	93
	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	%	68,17	68,17	100	77,48	77,83	100,45
	Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	23,22	20,18	94,6	26,97	20,1118	74,45
	Persentase Pengangkutan Sampah	%	79,07	74,56	103,24	89,31	80,56	90,20
	Persentase pengoperasian TPA	%	79,07	74,56	103,24	89,31	80	89,57
	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) Lebih dari 2 Kali Setahun	%	57,29	60	104,73	65,65	60	91,39



	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang Diterbitkan	%	68,17	173,73	254,21	77,46	95,71	123,56
	Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu Penerbitan Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap	%	100	416,67	416,67	100	90	90
	Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta Digital	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20%	%	90	78,40	94,125	90	80,20	89,11
	PDRB ADHB Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp. Juta	21,436	6,09	28,41	24,296	15,952	65,65

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 11 (*sebelas*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **91.58%**

3.1.1.15 Perjanjian Kinerja Ke limabelas : *Tercapainya ketersediaan, dan peningkatan produktifitas dan mutu produk unggulan pertanian*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
15. Tercapainya ketersediaan, dan Peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	12,667,582	9.572.440	75,56	14,316,970	9,679,253	67,60
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5,715,702	6.307.450	110,35	5,857,067	6,269,978	107,04
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	22,72	23	101,23	22,47	22	,90
	Nilai Tukar Petani	Indeks	102,89	100.85	98,01	103,04	100,99	98,01

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 4 (*empat*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **90,66%**

3.1.1.16 Perjanjian Kinerja Ke enambelas : *Meningkatnya Jaringan Kelembagaan dan Investasi industri Pertanian*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
16 Meningkatkan Jaringan Kelembagaan dan Investasi Industri Pertanian	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	12,667,582	9.572.440	75,56	14,316,970	9,679,253	67,60
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5,715,702	6.307.450	110,35	5,857,087	6,269,978	107,04
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	22,72	22	96,83	22,47	22	97,90
	Nilai Tukar Petani	Indeks	102,89	100.85	98,01	103,04	100,99	98,01
	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1,787,882	1.660.920	92,89	1,939,524	1,716,131	88,48
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1,278,875	1,293.390	101,13	1,330,739	1,303,382	97,94
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	%	0,73	0,70	95,89	0,73	0,70	95,89

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 7 (*tujuh*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **93,26 %**

3.1.1.17 Perjanjian Kinerja Ke tujuhbelas : *Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
17. Meningkatkan ketahanan pangan yang berbasis Pemberdayaan masyarakat	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	12,667,582	9.572.440	82,75	14,316,970	9,679,253	67,60
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5,715,702	6.307.450	110,86	5,715,702	6,269,978	109,69
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	22,72	23	110,05	22,47	22	97,90
	Nilai Tukar Petani	Indeks	102,89	100,85	98,01	103,04	100,99	98,01
	Ketersediaan energi dan protein perkapita	%	100	88	88	100	88	88
	Penguatan cadangan pangan	%	93,11	86	92,36	100	85	85
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	100	93	93	100	93	93
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	35	35	100	37	37



	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	100	80,3	80,3	100	80	80
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	60	60	100	60	60
	Penanganan daerah rawan pangan	%	93,11	60	64,43	93,11	65	69,80

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **11 (sebelas)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **80.54%**



3.1.1.18 Perjanjian Kinerja Ke delapanbelas : *Meningkatnya Pengelolaan dan Produk Maritim Bisnis*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
18. Meningkatnya pengelolaan dan produk maritim bisnis	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	14,316,970	9.572.440	66,86	14,316,970	9,679,253	67,60
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5,857,087	6.307.450	107,68	5,857,087	6,269,978	107,04
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	22,47	23	102,35	22,47	22	97,90
	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1,939,524	1.660.920	80,63	1,939,524	1,716,131	88,48
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1,330,739	1.293.390	97,19	1,330,739	1,303,382	97,94
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	%	0,73	0,70	95,89	0,73	0,70	95,89

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **6 (enam)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **92,47%**

3.1.1.19 Perjanjian Kinerja Ke sembilanbelas : *Meningkatnya Pengelolaan dan Produk Maritim Bisnis*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALIASI		TARGET	REALIASI	
19. Meningkatkan sarana dan prasarana maritim bisnis	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	12,667,582	9.572.440	75,56	14,316,970	9,679,253	67,60
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5,715,702	6.307.450	110,35	5,857,087	6,269,978	107,04
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	22,72	23	101,23	22,47	22	97,90

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **3 (tiga)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **90,84%**

3.1.1.20 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh : *Meningkatnya Kualitas Kawasan/ Destinasi Wisata*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
20. Meningkatkan kualitas kawasan/ destinasi wisata	Jumlah Wisatawan	Orang	6,504,095	1.820.693	27,99	7,421,621	1.651. 326	22,25
	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	1,34	1,34	100	1,40	1,20	85,71
	PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	462,681	311.090	67,23	538,946	305,808	96,74
	PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	227,467	214.570	94,33	242,555	205,070	84,54

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 4 (*empat*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **72,31%**

3.1.1.21 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh satu : *Menguatnya SDM Pelaku/ Masyarakat Wisata*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
21. Menguatnya SDM Pelaku/masyarakat Wisata	Jumlah Wisatawan	Orang	6,504,095	1.820.693	27,99	7,421,621	1.651. 326	22,25
	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	1,34	1,34	100	1,40	1,20	85,71
	PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	462,681	325.681	70,38	538,946	305,808	72,42
	PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	227,467	207.000	91,00	242,555	205,070	84,54

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **4 (empat)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **66,23%**

3.1.1.22 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh dua : *Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Objek Wisata*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
22. Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Objek Wisata	Jumlah Wisatawan	Orang	6,504,095	1.820.693	27,99	7,421,621	1.651. 326	22,25
	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	1,34	1,34	100	1,40	1,20	85,71
	PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	462,681	311.090	67,23	538,946	305,808	72,42
	PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	227,467	204.570	89,93	242,555	205,070	84,54
	Cakupan kajian seni 50%	%	100	50	100	100	50	100
	Cakupan fasilitasi seni 30%	%	100	15	50	100	15	50
	Cakupan gelar seni 75%	%	100	60	60	100	60	80
	Misi kesenian 100%	%	100	70	70	100	70	70
	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	%	100	25	100	100	25	100
	Cakupan tempat 100%	%	100	70	70	100	70	70
	Cakupan organisasi 34%	%	100	25	73,52	100	27	79,41

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **11 (sebelas)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **74,03%**

3.1.1.23 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh tiga : *Meningkatnya Kelembagaan, jaringan dan investasi industry pertanian.*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
23. Meningkatkan kelembagaan, jaringan dan investasi industri pertanian	PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan	Rp. Juta	1,434,786	1.079.070	75,20	1,665,671	1,105,992	66,39
	PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan	Rp. Juta	777,622	689.740	88,69	842,080	694,947	82,52
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Pendidikan	%	5,12	3,2	62,5	5,23	3,5	66,92
	Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	Indeks	63,59	65,95	103,71	63,86	65	101,78

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 4 (*empat*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **79,40%**

3.1.1.24 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh empat : *Meningkatnya Inovasi pada sektor Agro, Maritim dan Wisata*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
24. Meningkatkan inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	Rp. Juta	12,667,582	9.572.440	75,56	14,316,970	9,679,253	67,60
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	Rp. Juta	5,715,702	6.307.450	110,35	5,857,087	6,269,978	107,04
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	22,72	23	101,09	22,72	22	96,83
	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1,939,524	1.660.192	85,59	1,939,524	1,716,131	88,48
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1,330,739	1.293.390	97,19	1,330,739	1,303,382	97,94
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor industri pengolahan	%	0,73	0,70	95,89	0,73	0,72	98,63
	Nilai Tukar Petani	Indeks	102,89	100.85	98,01	103,04	100,99	98,01

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 7 (*tujuh*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **93,50%**

3.1.1.25 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh lima : *Terciptanya Birokrasi yang Bersih dan Melayani*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
25	Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani	Implementasi Maturitas Level SPIP	Level	Level 3	Level 3	100	Level 3	Level 3	100
		Kapabilitas APIP	Level	Level 3 DCT	Level 3	100	Level 3 DCT	Level 3 DCT	100
		Opini LKPD	Tingkat	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
		Nilai SAKIP		BB	BB	100	BB	BB	100
		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas pelayanan public	%	82,00	80,19	97,79	86,10	82,76	96,12
		Rata-rata Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal	%	90,53	80	88,36	95,00	82	86,31
		PDRB ADHB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp. Juta	3,006,082	1.742.980	57,98	3,570,564	1,832,203	51,31
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	%	1,339,169			1,530,508		



	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	hari	365,00	365	100	365,00	365,00	100
	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	kegiatan	12,00	12	100	12,00	12,00	100
	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	kegiatan	12	12	100	12	12	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **11 (sebelas)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **84.88%**

3.1.1.26 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh enam : *Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA	TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA
-------------------	-------------------	--------	------------	-----------------	------------	-----------------



	STRATEGIS		TARGET	REALISASI	TAHUN 2020 (%)	TARGET	REALISASI	TAHUN 2021 (%)	
26	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Opini LKD	Tingkat	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
		Peningkatan Pendapatan Daerah	Rp. Milyar	229.068.192.270,00	218.161.098.752	95,23	226.977.573.321,00	196.060.817.592	86,38
		Persentase kenaikan PAD	%	125,00	86,72	69,36	150,00	89,86	59,90
		Alokasi anggaran untuk pembangunan	%	899.000.000.000	817.904.587.471	90,97	899.000.000.000	1.807.633.051.025,00	201,07

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 4 (*empat*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **111.83%**



3.1.1.27 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh tujuh : *Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA	TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA
-------------------	-----------------------------	--------	------------	-----------------	------------	-----------------



			TARGET	REALISASI	TAHUN 2020 (%)	TARGET	REALISASI	TAHUN 2021 (%)	
27	Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah	PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	Rp. Juta	91,100	64.890	71,22	104,186	66,058	63,40
		PDRB ADHB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp. Juta	849,128	717.370	84,48	946,422	734,713	77,63
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor jasa perusahaan	%	0,85	0,23	27,05	0,83	0,35	42,158
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	%	3,34	2,57	76,94	3,41	2,75	80,64
		PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	Rp. Juta	12,667,582	9.572.440	75,56	14,316,970	9,679,253	67,60
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan	%	22,72	23	108,82	22,47	22	97,90
		Kemampuan Investasi	Rp. Miliar	650.020.000 .000	726.842.910. 458,00	111,81	659.120.000 .000	2.233.870.24 0.624	338,92

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 7 (*tujuh*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **109,75%**

3.1.1.28 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh delapan : *Terciptanya masyarakat yang demokratis*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA	TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA
-------------------	-----------------------------	--------	------------	-----------------	------------	-----------------



			TARGET	REALISASI	TAHUN 2020 (%)	TARGET	REALISASI	TAHUN 2021 (%)	
28	Terciptanya masyarakat yang demokratis	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik	%	82,00	80,19	97,79	86,10	82,76	96,12
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	hari	365,00	365	100	365,00	365	100
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya	kegiatan	12,00	12	100	12,00	12	100
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	kegiatan	12,00	12	100	12,00	12	100
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan	%	94,00	69,92	74,06	100	70,2	70,2



	Tidak terjadinya konflik bernuansa suku, ras dan antargolongan, konflik politik, konflik perebutan sumber daya alam, diskriminasi, dan kekerasan lain yang merusak fasilitas publik, serta tindakan terorisme	Kali	-	0	100	-	0	100
	Tingkat Partisipasi Politik Pemilu	%	68,96	78,28	113,51	75	69,47	92,62

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 7 (*tujuh*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **94,13%**

3.1.1.29 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh sembilan : *Terciptanya supremasi hukum*



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
29 Terciptanya Supremasi hukum	Implementasi Maturitas Level SPIP	Level	Level 3	Level 3	100	Level 3	Level 3	100
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	%	98,45	37	37,58	100	83,86	83,86
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten/ Kota	%	95,64	100	104,55	100	100	100
	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	100	100	100	100	90	90
	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Patroli/hari/orang	100	30	30	100	98	98

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 5 (*lima*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 94.37%

3.1.1.30 Perjanjian Kinerja Ke tiga puluh : Pengurangan Resiko Bencana



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
30 Pengurangan Risiko Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	98,45	85	86,33	100	85,7	85,7
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	95,64	85	88,87	100	85,7	85,7
	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	99,75	33,33	33,41	100	17,5	17,5
	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK	%	100	60	60	100	60	60
	Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar negeri skala provinsi	%	93,11			100		
	Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	%	97,91	85	85,81	100	86	86
	Evakuasi korban bencana skala provinsi	%	97,91	85	86,81	100	86	86

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 6 (*enam*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **70,15%**

3.2 PENCAPAIAN KINERJA

3.2.1 PENCAPAIAN KINERJA BERDASARKAN MISI

Evaluasi capaian kinerja berdasarkan visi Kabupaten Pandeglang tahun 2016-2021, didasarkan pada capaian rata-rata nilai misi Kabupaten Pandeglang yang dihitung berdasarkan capaian sasaran strategis Kabupaten Pandeglang sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Pencapaian misi pertama yaitu *“Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat”* dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat;
 - b. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat;
 - c. Tertanggulangnya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Meningkatnya fungsi serta sarana dan prasarana perdagangan dan pasar;
 - e. Meningkatnya implementasi norma agama;
 - f. Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga;
 - g. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. Terkendalinya angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi;
 - i. Meningkatnya pemberdayaan koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah;
 - j. Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.

Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut adalah **88,34** % dengan kriteria penilaian *memuaskan*. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi pertama. Gambaran umum capaian nilai kinerja berdasarkan misi pertama dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Pertama

Misi ke 1	SASARAN	Tingkat Capaian	Bobot	Nilai Capaian	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2020	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2021
Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat	90,87	1,053	95,68	95,19	88,34
	2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat	94,23	1,093	102,99		
	3. Tertanggulangnya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat	78,81	0,914	72,03		
	4. Meningkatkan fungsi serta sarana dan prasarana perdagangan dan pasar	64,726	0,75	48,59		
	5. Meningkatnya Implementasi norma agama	90,11	1,045	94,173		
	6. Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga	100,454	1,165	117,03		
	7. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	87,5	1,015	88,81		
	8. Terkendalinya angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi	105,53	1,223	129,06		
	9. Meningkatnya pemberdayaan koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah	86,66	1,022	88,56		
	10. Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat	63,33	0,734	46,484		

sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2016-2021, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

- Pencapaian misi kedua yaitu “ *Membangun Konektivitas Wilayah*” dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut :
- Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi untuk mendorong dan membangun konektivitas wilayah;
 - Terlaksananya pembangunan dan penataan, fasilitasi dan koordinasi untuk menjadikan aktivitas perekonomian lancar;
 - Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana prasarana khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan;
 - Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup.

Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut di atas adalah **88,23%** dengan kriteria penilaian *memuaskan*. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi kedua. Gambaran umum capaian nilai kinerja berdasarkan misi pertama dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.12.

Tabel 3.12

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Kedua

Misi ke-2	SASARAN	Tingkat Capaian	Bobot	Nilai Capaian	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2020	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2021
<i>Membangun Konektivitas Wilayah</i>	1. Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi untuk mendorong dan membangun konektivitas wilayah	73,05	0,83	60,63	102,53	88,23
	2. Terlaksananya pembangunan dan penataan, fasilitasi dan koordinasi untuk menjadikan aktivitas perekonomian lancar	101,015	1,157	116,87		
	3. Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana prasarana khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan	83,53	0,95	79,35		
	4. Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup	91,58	1,049	96,06		

Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2016-2021, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

- Pencapaian misi ketiga yaitu “Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian” dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut:
 - a. Tercapainya ketersediaan, dan peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian;
 - b. Meningkatnya jaringan kelembangan dan investasi industri pertanian;
 - c. Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut adalah **88.713** dengan kriteria *memuaskan*. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi ketiga. Gambaran umum capaian kinerja berdasarkan misi ketiga dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Ketiga

Misi ke-3	Sasaran	Tingkat Capaian	Bobot	Nilai Tingkat Capaian	Capaian Kinerja Berdasarkan Misi Tahun 2020	Capaian Kinerja Berdasarkan Misi Tahun 2021
Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian	1 Tercapainya ketersediaan, dan peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian	90,66	1,03	93,37	92,25	88,71
	2 Meningkatnya jaringan kelembangan dan investasi industri pertanian	93,26	1,058	98,67		
	3 Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat	80,54	0,92	74,1		

Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2016-2021, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

- Pencapaian misi keempat yaitu “*Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Maritim*” dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya pengelolaan dan produk maritimbisnis;
 - b. Meningkatnya sarana dan prasarana maritimbisnis.

Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut adalah **91.71 %**, dengan kriteria *memuaskan*. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi keempat. Gambaran umum capaian kinerja berdasarkan misi keempat dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Keempat

Misi ke-4	Sasaran	Tingkat Capaian	Bobot	Nilai Tingkat Capaian	Capaian Kinerja Berdasarkan Misi Tahun 2020	Capaian Kinerja Berdasarkan Misi Tahun 2021
Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Maritim	1 Meningkatkan pengelolaan dan produk maritimbisnis	92.47	1,01	93,40	93,83	91,71
	2 Meningkatkan sarana dan prasarana maritimbisnis	90.84	0,991	90,02		

Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2016-2021, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

- Pencapaian misi kelima yaitu “*Modernisasi Pengelolaan Potensi Wisata*,” dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas kawasan/destinasi wisata;
 - b. Menguatnya SDM pelaku/masyarakat wisata;
 - c. Meningkatnya manajemen pengelolaan objek wisata.

Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut adalah **71,24 %**, dengan kriteria *baik*. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi kelima. Gambaran umum capaian kinerja berdasarkan misi kelima dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Target, Realisasi dan Capaian kinerja Misi Kelima

Misi ke-5	Sasaran	Tingkat Capaian	Bobot	Nilai Tingkat Capaian	Capaian Kinerja Berdasarkan Misi Tahun 2020	Capaian Kinerja Berdasarkan Misi Tahun 2021
Modernisasi Pengelolaan Potensi Wisata	1 Meningkatkan kualitas kawasan/destinasi wisata	72,31	1.02	73,75	73,05	71,24
	2 Menguatnya SDM pelaku/masyarakat wisata	66,23	0.94	62,25		
	3 Meningkatkan manajemen pengelolaan objek wisata	74,03	1.05	77,73		

Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2016-2021, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

- Pencapaian misi keenam yaitu *“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Memperkuat Sistem Inovasi Daerah”* dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kelembagaan, jaringan dan budaya inovasi;
 - b. Meningkatnya inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata;
 - c. Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani;
 - d. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah;
 - e. Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah;
 - f. Terciptanya masyarakat yang demokratis;
 - g. Terciptanya supremasi hukum;
 - h. Berkurangnya resiko bencana.

Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut di atas adalah **91,61%**, dengan kriteria *Memuaskan*. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi keenam. Gambaran umum capaian kinerja berdasarkan misi keenam dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Keenam

Misi ke-6	Sasaran	Tingkat Capaian	Bobot	Nilai Tingkat Capaian	Capaian Kinerja Berdasarkan Misi Tahun 2020	Capaian Kinerja Berdasarkan Misi Tahun 2021	
<i>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Memperkuat Sistem Inovasi Daerah</i>	1	Meningkatnya kelembagaan, jaringan dan investasi Industri pertanian	79,40	0,86	68,28	85, 61	91, 61
	2	Meningkatnya inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata	93,50	1,12	104,72		
	3	Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani	84,88	1,014	86,06		
	4	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	111,83	1,05	117,42		
	5	Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah	109,75	0,94	103,165		
	6	Terciptanya masyarakat yang demokratis	94,13	1,16	109,2		
	7	Terciptanya supremasi hukum	94,37	0,88	83,045		
	8	Berkurangnya resiko bencana	70,15	0,87	61,03		

Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2016-2021, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

3.1.4 PENCAPAIAN KINERJA BERDASARKAN VISI

Capaian kinerja berdasarkan visi Kabupaten Pandeglang dihitung berdasarkan rata-rata dari hasil perkalian antara nilai capaian tiap misi dengan bobot atas dasar kedekatan dengan visi. Gambaran lebih jelasnya mengenai capaian nilai kinerja berdasarkan visi Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.17 berikut ini.

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Berdasarkan Visi Kabupaten Pandeglang

No	Misi	Capaian Misi	Bobot	Nilai Misi	Capaian Kinerja berdasarkan Visi Tahun 2020	Capaian Kinerja Berdasarkan Visi Tahun 2021
1	Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	88,34	1,02	90,10	91,33	87,72
2	Membangun konektivitas wilayah	88,23	1,02	89,99		
3	Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian	88,713	1,03	91,4		
4	Meningkatkan nilai tambah sektor maritime	91,71	1,06	97,2		
5	Modernisasi pengelolaan potensi wisata	71,24	0,85	60,55		
6	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat sistem inovasi daerah	91,61	1,06	97,10		

Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2016-2021, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

3.3. REALISASI ANGGARAN KABUPATEN PANDEGLANG

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintah yang menugaskan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang lebih berperan pada fungsi alokasi karena lebih mengetahui kebutuhan serta Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakatnya. Sementara fungsi distribusi dan stabilisasi, efektifnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

APBD sebagai sarana otonomi dan gambaran kebijakan Pemerintah Daerah disusun mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara operasional APBD merupakan alat untuk mengukur kemampuan potensi dan sebagai alat alokasi dana/pembiayaan untuk berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Secara keseluruhan, APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 dapat di rinci sebagai berikut :

1. Pendapatan

Kondisi Umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 disesuaikan dengan struktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan produk hukum aturan pengelolaan keuangan yang lebih tinggi.

Adapun struktur Pendapatan Daerah terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah

2) Pendapatan Transfer

- Dana Transfer Pemerintah Pusat
- Dana Transfer Antar Daerah

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- Pendapatan Hibah
- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Keentuan Peraturan Perundang-undangan

a. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang pada APBD tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar **Rp 2.544.847.521.620,42** atau 97,25% dari target yang ditetapkan sebesar **Rp 2.616.841.337.898,00**. Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2021 secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.18

Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.616.841.337.898,00	2.544.847.521.620,42	97,25
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	226.977.573.321,00	196.060.817.592,42	86,38
4.1.01	Pajak Daerah	50.854.640.742,00	51.999.556.632,00	102,25
4.1.02	Retribusi Daerah	16.820.697.695,00	12.263.317.292,00	72,91
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.090.396.805,00	14.090.396.805,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	145.211.838.079,00	117.707.546.863,42	81,06
42	PENDAPATAN TRANSFER	2.176.194.721.411,00	2.167.823.638.939,00	99,62
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.985.003.129.515,00	1.976.633.547.043,00	99,58
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	191.191.591.896,00	191.190.091.896,00	100,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	213.669.043.166,00	180.963.065.089,00	84,69
4.3.01	Pendapatan Hibah	52.353.343.166,00	21.099.478.089,00	40,30
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	161.315.700.000,00	159.863.587.000,00	99,10

Sumber: BPKD Kabupaten Pandeglang 2021 (unaudited)

4) Belanja Daerah

Sesuai dengan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas APBD tahun anggaran 2021, belanja daerah terealisasi sebesar **Rp2.623.024.102.906,23** atau 95,64% dari target yang ditetapkan sebesar **Rp2.508.587.723.650,00**. secara umum target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Pandeglang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 3.19

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%
5	BELANJA	2.680.883.370.092,00	2.541.213.535.445,00	94,79
51	BELANJA OPERASI	1.924.569.931.284,00	1.807.633.051.025,00	93,92
5.1.01	Belanja Pegawai	1.223.443.561.477,00	1.176.531.273.521,00	96,17
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.417.771.814,00	534.743.932.718,00	89,06
5.1.03	Belanja Bunga	50.000.000,00	5.393.216,00	10,79
5.1.05	Belanja Hibah	74.666.456.493,00	72.384.478.770,00	96,94
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.992.141.500,00	23.967.972.800,00	92,21
52	BELANJA MODAL	355.491.324.808,00	333.536.753.313,00	93,82
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.574.200.020,00	3.552.558.650,00	99,39
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan	94.595.930.037,00	84.386.292.299,00	89,21
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan	72.068.172.650,00	67.532.195.145,00	93,71
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan	176.214.910.077,00	169.441.492.726,00	96,16
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.728.112.024,00	8.434.753.493,00	96,64
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	310.000.000,00	189.461.000,00	61,12
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.591.875.000,00	3.675.808.549,00	80,05
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.591.875.000,00	3.675.808.549,00	80,05
54	BELANJA TRANSFER	396.230.239.000,00	396.367.922.558,00	100,03
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.503.398.000,00	7.497.646.750,00	99,92
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	388.726.841.000,00	388.870.275.808,00	100,04
	Total Surplus/(Defisit)	- 64.042.032.194,00	3.633.986.175,42-	5,67

Sumber: BPKD Kabupaten Pandeglang 2021 (unaudited)

5) Pembiayaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel. 3.20

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
6	PEMBIAYAAN			
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65.042.032.194,00	65.059.532.194,32	100,03
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65.042.032.194,00	65.059.532.194,32	100,03
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	65.042.032.194,00	65.059.532.194,32	100,03
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	Pembiayaan Netto	64.042.032.194,00	64.059.532.194,32	100,03
63	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	-	67.693.518.369,74	

Sumber: BPKD Kabupaten Pandeglang 2021 (unaudited)

Saldo Kas

Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 menghasilkan saldo kas sebesar Rp. 0 Sisa ini didapat dari selisih antara surplus belanja daerah ditambah penerimaan pembiayaan dan dikurangi pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3.21
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)
21.	Pendapatan	2.544.847.521.620,42
2.	Belanja	2.541.213.535.445,00
3.	Surplus/Defisit	3.633.986.175,42
4.	Pembiayaan Netto	64.059.532.194,32
5.	Sisa Perhitungan APBD	67.693.518.369,74

Sumber: BPKD Kabupaten Pandeglang 2021

Pelaksanaan APBD sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik serta tuntutan perubahan di era reformasi yang berkembang akhir-akhir ini. Beberapa penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilaksanakan, namun sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bernuansa lebih memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan pokok Pajak dan Retribusi Daerah. Selain itu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah telah melaksanakan restrukturisasi Anggaran Pendapatan Daerah.

Penyusunan APBD Kabupaten Pandeglang dewasa ini tidak hanya mengacu kepada satu peraturan perundangan saja (*omnibus regulations*) melainkan juga mengacu kepada beberapa peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka menghasilkan sistem akuntansi yang lebih kompatibel, komprehensif dan bertanggungjawab. Selain itu, banyaknya dasar hukum yang dijadikan acuan (konsideran) dalam penyusunan APBD ini diharapkan juga akan mampu memberikan beberapa aspek positif, antara lain:

1. Kemudahan untuk diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Adanya Sinkronisasi dan keselarasan antar pengaturan;
3. Memberikan arah sekaligus tidak membingungkan pihak pelaksana dan
4. Pemeriksa keuangan;
5. Memperhatikan kapasitas fiskal daerah.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan 122 program, 30 sasaran strategis, 33 urusan pemerintah daerah dan 9 fungsi. Program/ kegiatan tersebut mendorong/ menstimulus nilai kinerja sasaran terhadap pencapaian visi Kabupaten Pandeglang pada tahun 2021 sebesar **87,72%** dan masuk pada kategori “memuaskan”.

Dilihat dari pencapaian keseluruhan dalam pencapaian kinerja tahun 2020 ini masih perlu adanya penyempurnaan dan peningkatan secara optimal, berdasarkan komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014, komponen tersebut :

- a. Perencanaan
- b. Pengukuran kinerja
- c. Pelaksanaan Perencanaan
- d. Evaluasi, dan
- e. Pelaporan

Komponen - komponen tersebut harus dievaluasi kembali agar penerapan Sistem AKIP dapat lebih sempurna dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dan efektif dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pembangunan khususnya yang telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang (RPJMD)

4.2 SARAN

Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis di tahun berikutnya yang merupakan pelaksanaan tahun ke lima atau transisi dari periode RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021, pencapaian indikator-indikator sasaran strategis, diharapkan agar memperoleh nilai pencapaian yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan nilai capaian sasaran strategis pada pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026, sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Periode ke-dua dimasa jabatan Tahun 2021-2024.

Selain itu, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pembangunan, serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam semua tahap pembangunan yang lebih intensif antar instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam memperkuat pencapaian nilai akuntabilitas kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya evaluasi dan kajian kembali terhadap rencana strategis, indikator kerja, rencana kerja, dan perjanjian kinerja SKPD untuk lebih melihat dan menilai keselarasan program-program SKPD dengan RPJMD dan konektivitas program antar SKPD yang mendukung keberhasilan pencapaian pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.



BUPATI PANDEGLANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. IRNA NARULITA, SE, MM

Jabatan : BUPATI PANDEGLANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pandeglang, Februari 2021

BUPATI PANDEGLANG

Hj. IRNA NARULITA, SE, MM

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
1. Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Kepada Seluruh Masyarakat	- Angka Partisipasi Sekolah		
	a. SD Sederajat	100,00	%
	b. SMP Sederajat	100,00	%
	- Angka Partisipasi Murni		
	a. SD Sederajat	98,55	%
	b. SMP Sederajat	77,37	%
	- Angka Partisipasi Kasar		
	a. SD Sederajat	100,00	%
	b. SMP Sederajat	86,27	%
	- Angka Melek Huruf	100,00	%
	- Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,19	Tahun
	- Indeks Pendidikan	66,99	Indeks
	- PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan	1.665,671	Rp. Juta
	- PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan	842	Rp. Juta
- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor	5,23	%	
2. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat	- Angka Harapan Hidup	65,77	Tahun
	- Angka Kesakitan	20,15	%
	- Rata-rata lama sakit	3,73	Hari
	- Persentasi Balita Gizi Buruk	0,58	%
	Indeks Angka Harapan Hidup /Indeks Kesehatan	66,62	Indeks
	- PDRB ADHB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	441,675	Rp. Juta
	- PDRB ADHK Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	244,544	Rp. Juta
3. Tertanggulangnya Kemiskinan dan Pengangguran yang Diprioritaskan Pada Kantong- kantong Kemiskinan dengan Memprioritaskan Pemberdayaan Masyarakat	- Jumlah Penduduk Miskin	96,421	Jiwa
	- Persentasi Penduduk di bawah Garis Kemiskinan	7,13	%
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	7,08	%
	- Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	63,86	Indeks
	- Indeks Gini Rasio	0,17	Indeks

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
4. Meningkatkan Fungsi Serta Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Pasar	Tingkat Inflasi	8,40	%
	PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.286.988	Rp. Juta
	PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	104.186	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.807.751	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Jasa Perusahaan	51.126	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,91	%
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Perusahaan	0,83	%
5. Meningkatnya Implementasi Norma Agama	Jumlah Fasilitas/ Bantuan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keagamaan	100	Lembaga/ Organisasi
	Tidak Terjadinya Konflik Umat Beragama Skala Provinsi dan Nasional	-	Kali
	Jumlah Pembinaan, Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	91	Kali
	Angka Partisipasi Sekolah MI / SD Sederajat	100,00	%
	Angka Partisipasi Murni MI / SD Sederajat	98,55	%
	Angka Partisipasi Kasar MI / SD Sederajat	100,00	%
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,19	Tahun
	Indeks Pendidikan	66,99	Indeks
6. Meningkatnya Kapasitas Pemuda Berprestasi dan Sarana Olahraga	Juara Olahraga Tingkat Provinsi / Nasional	3	Cabang
	Pembangunan dan Pemanfaatan GOR Multiguna Sebagai Gedung Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	2	Unit
	Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan	5	Penghargaan
	Jumlah Fasilitas Pengembangan Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	20	Fasilitas/ Kegiatan
	Jumlah Fasilitas Olahraga	11	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN

7.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100,00	%
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di PUSKESMAS mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	100,00	%
		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100,00	%
		Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100,00	%
		Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100,00	%
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	100,00	%
		Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100,00	%
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100,00	%
8.	Terkendalinya Angka Kelahiran dengan Meningkatkan Kualitas Reproduksi	Jumlah Penduduk	1.351.525	Jiwa
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,13	%
		Jumlah Rumah Tangga	393.682	KK
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun 3,5%	100,00	%
		Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%.	100,00	%
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak Terpenuhi (Unmet Need) 5%	100,00	%
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB 70%	100,00	%
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	100,00	%
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100,00	%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu)petugas di setiap Desa/ Kelurahan.	100,00	%
	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat 30% Setiap Tahun	100,00	%
	Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% di SetiapTahun	100,00	%

9.	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah	Terselenggaranya Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Kerjasama Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) Tingkat Kabupaten/Kota dengan Pengusaha Tingkat Provinsi/ Nasional	1	1 Kali/ Tahun
		PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1.939.524	Rp. Juta
		PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, danReparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.266.988	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1.330.739	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, danReparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.807.751	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	0,73	%
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,91	%
		Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	63,88	Indeks
10.	Meningkatnya Etos Kerja dan Produktivitas Masyarakat	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan BerbasisKompetensi	100,00	%
		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan BerbasisMasyarakat	100,00	%
		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan PelatihanKewirausahaan	100,00	%
		Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	100,00	%
		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama(PB)	100,00	%
		Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta ProgramJamsostek	100,00	%
		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100,00	%
		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	100,00	%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN

11.	Terlaksananya Fasilitasan Koordinasi Untuk Mendorong dan Membangun Konektivitas	PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	3,162,848	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan	1,532,088	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Transportasi dan Pergudangan	1,45	%
		Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100,00	%
		Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100,00	%
		Tersedianya Halte pada Setiap Kabupaten/Kota yang Telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	100,00	%
		Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang pada Setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	100,00	%
		Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka dan Guardrail) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Jalan Kabupaten/Kota	100,00	%
		Tersedianya Kapal Laut yang Beroperasi pada Lintas atau Trayek dalam Kabupaten/ Kota untuk Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang telah Berkembang pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran dan tidak ada Alternatif Angkutan Tersedianya Kapal Laut yang Beroperasi pada Lintas atau Trayek dalam Kabupaten/ Kota untuk Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang telah Berkembang pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran dan tidak ada Alternatif Angkutan Jalan	100	%
		Tersedianya Dermaga pada setiap Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/kota untuk Melayani Kapal Laut yang Beroperasi pada Trayek dalam Kabupaten/Kota pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran dan tidak ada Alternatif Angkutan Jalan	100,00	%
Rasio Elektrifikasi	100,00	%		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
	PDRB ADHB Sektor Pertambangan & Penggalian	3,924,893	Rp. Juta
	PDRB ADHB Sektor Listrik dan Gas	907,027	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Pertambangan & Penggalian	1.913.739	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1.330.739.07	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertambangan & Penggalian	60,96	%
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	0,73	%
12. Terlaksananya Pembangunan dan Penataan, Fasilitasi dan Koordinasi untuk Menjadikan Aktivitas Perekonomian Lancar	Media Massa Seperti Majalah, Radio dan Televisi	12,00	Kegiatan
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Baru seperti Website (media online)	365,00	Hari
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Tradisional Seperti Pertunjukan Rakyat	12,00	Kegiatan
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Interpersonal seperti Sarasehan, Ceramah/Diskusi dan Lokakarya	12,00	Kegiatan
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Luar Ruang Seperti Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho	12,00	Kegiatan
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi di Tingkat Kecamatan	100,00	%
	Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangannya	71,25	%
	PDRB ADHB Sektor Informasi dan Komunikasi	110,165	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Informasi dan Komunikasi	124.536	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Informasi dan Komunikasi	0,31	%
13. Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Khususnya Jalan Menuju Kawasan Agribisnis, Destinasi Pariwisata dan Pusat Pemerintahan Kecamatan	Kondisi jalan		
	a. Baik	53,56	%
	b. Sedang	24,22	%
	c. Buruk	10,52	%
	d. Rusak Berat	11,71	%
	PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	3.162.848	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan	1.532.088	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Transportasi dan Pergudangan	1,45	%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten/Kota Baik dan Sedang	77,77	%
	Persentase Terhubungnya Pusat-pusat Kegiatan dan PusatProduksi di Wilayah Kabupaten/Kota	100,00	%
	PDRB ADHB Sektor Bangunan	2,491,342	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Bangunan	1,366,160	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,83	%

14.	Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Kawasan, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Serta Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air minum yang aman	100,00	%
		Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	77,46	%
		Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan	26,97	%
		Persentase Pengangkutan Sampah	89,31	%
		Persentase pengoperasian TPA	89,31	%
		Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) Lebih dari 2 Kali Setahun	65,65	%
		Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang Diterbitkan	77,46	%
		Persentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	77,46	%
		Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu Penerbitan Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap	100	%
		Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta Digital	100,00	%
		Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20%	100,00	%
		PDRB ADHB Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,296	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,362	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,50	%
15.	Tercapainya ketersediaan, dan Peningkatan produktivitas dan mutu	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,316,970	Rp. Juta

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
produk unggulan pertanian	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,857,087	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,47	%
	Nilai Tukar Petani	103,04	Indeks

16. Meningkatkan Jaringan Kelembagaan dan Investasi Industri Pertanian	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,316,970	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,857,087	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,47	%
	Nilai Tukar Petani	103,04	Indeks
	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1,939,524	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1,330,739	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	0,73	%
17. Meningkatkan ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,316,970	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,715,702	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,47	%
	Nilai Tukar Petani	103,04	Indeks
	Ketersediaan energi dan protein perkapita	100,00	%
	Penguatan cadangan pangan	100,00	%
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100,00	%
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	100,00	%
	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100,00	%
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100,00	%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
	Penanganan daerah rawan pangan	100,00	%
18. Meningkatkan pengelolaan dan produk maritim bisnis	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,316,970	Rp.Juta
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,857,087	Rp.Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,47	%
	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1,939,524	Rp.Juta
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1,330,739	Rp.Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	0,73	%

19. Meningkatkan sarana dan prasarana maritim bisnis	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,316,970	Rp.Juta
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,857,087	Rp.Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,47	%

20. Meningkatkan kualitas kawasan/destinasi wisata	Jumlah Wisatawan	7,421,621	Orang
	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	1,40	Hari
	PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	538,946	Rp.Juta
	PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	242,555	Rp.Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Lainnya	2,83	%

21. Menguatnya SDM Pelaku/masyarakat Wisata	Jumlah Wisatawan	7,421,621	Orang
	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	1,40	Hari
	PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	538,946	Rp.Juta
	- PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	242,555	Rp.Juta
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Lainnya	2,83	%

22. Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Objek Wisata	Jumlah Wisatawan	7,421,621	Orang
	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	1,40	Hari
	PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	538,946	Rp.Juta
	PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	242,555	Rp.Juta

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor JasaLainnya	2,83	%
	Cakupan kajian seni 50%	100,00	
	Cakupan fasilitasi seni 30%	100,00	
	Cakupan gelar seni 75%	100,00	
	Misi kesenian 100%	100,00	
	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	100,00	
	Cakupan tempat 100%	100,00	
	Cakupan organisasi 34%	100,00	
23. Meningkatkan kelembagaan, jaringan dan Budaya Inovasi	PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan	1,665,671	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan	842,080	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Pendidikan	5,23	%
	Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	63,86	Indeks
24. Meningkatnya inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	14,316,970	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	5,857,087	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22	%
	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1,939,524	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1,330,739	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor industri pengolahan	0,73	%
	Nilai Tukar Petani	103,04	Indeks
25. Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani	- Implementasi Maturitas Level SPIP	Level 3	level
	- Kapabilitas APIP	Level 3	Level
	- Opini LKD	WTP	Nilai
	- Nilai SAKIP	BB	Nilai
	- Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas pelayanan publik	86,10	%
	- Rata-rata Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal	95,00	%
	-PDRB ADHB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,570,564	jt
	-PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,530,508	jt
	-Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	16,37	share

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
	- Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	365,00	hari
	- Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	12,00	kali
	- Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	12,00	kali
	- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan	100,00	%
26	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah		
	Opini LKD	WTP	Nilai
	Peningkatan Pendapatan Daerah		Jt
	Persentase kenaikan PAD	150,00	%
	Rasio Kemandirian Daerah	10,00	%
27	Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah		
	PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	104,186	Jt
	PDRB ADHB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	946,422	Jt
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor jasa perusahaan	0,83	NTB
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	3,41	NTB
	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	14,316,970	%
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,47	Share
	Kemampuan Investasi	659,12	%
28	Terciptanya masyarakat yang demokratis		
	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik	86,10	%
	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	365,00	hari
	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	12,00	kegiatan
	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	12,00	kegiatan
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan	100,00	%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021		
		TARGET	SATUAN	
	Tidak terjadinya konflik bernuansa suku, ras dan antargolongan, konflik politik, konflik perebutan sumber daya alam, diskriminasi, dan kekerasan lain yang merusak fasilitas publik, serta tindakan terorisme	-		
	Tingkat Partisipasi Politik Pemilu	75	%	
29	Terciptanya Supremasi hukum	Implementasi Maturitas Level SPIP	Level 3	level
		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	100,00	%
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten/ Kota	100,00	%
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	100,00	%
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100,00	%

30	Pengurangan Risiko Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	%
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	%
		Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	100	%
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK	100	%
		Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala provinsi	100	%
		Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi	100	%
		Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	100	%
		Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	100	%
		Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	100	%
		Evakuasi korban bencana skala provinsi	100	%
		Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	100	%

Sasaran ini didukung oleh Anggaran Organisasi Perangkat Daerah:

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	235.898.364.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	20.000.000	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	175.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	40.000.000	
	PROGRAM PEMHIMPAN SEJARAH	25.000.000	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	80.000.000	
2	DINAS KESEHATAN		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	153.165.327.900	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	150.000.000	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	355.783.000	
3	RUMAH SAKIT UMUM " BERKAH "		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.685.464.720	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	26.857.877.988	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.719.212.000	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.826.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	42.864.048.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	50.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	650.000.000	
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.347.901.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.398.353.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	841.557.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	18.107.785.000	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	22,448,230,580	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,411,185,772	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	163,167,000	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	200,000,000	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	6,105,985,500	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	108,287,500	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	25,000,000	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	3,381,721,020	
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	75,000,000	
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	480,000,000	
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	22,189,421,570	
8	DINAS SOSIAL		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	335,610,000	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	5,000,000	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	397,454,500	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7,688,735,000	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	351,982,900	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	20,000,000	
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	210,934,000	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	35,250,000	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	48,550,500	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	70,125,500	
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK		

	PROGRAM PENGARLISUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	76,668,000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	80,231,000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	125,000,000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	90,000,000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	120,514,000
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10,202,437,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KSI)	958,400,000
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	810,000,000
	PROGRAM PENANGANAN KEKAWANAN PANGAN	175,000,000
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	125,000,000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	118,870,000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	20,066,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPIH)	35,000,000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2,893,300,000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,613,524,300
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	734,945,000
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	680,800,000
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	50,000,000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DEBA	
	PROGRAM PENATAAN DESA	1,515,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	15,000,000
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2,892,166,500
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	49,870,000

15	DINAS PERHUBUNGAN	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (L.L.AJ)	1,514,900,000
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	533,403,000
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	430,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	239,628,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100,000,000
17	DINAS KOPERASI DAN UMKM	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	169,000,000
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	10,000,000
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	145,455,000
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	25,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERHINDUNGAN KOPERASI	37,500,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	40,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	343,264,000
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	45,000,000
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	30,000,000
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	52,000,000
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	572,452,000
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50,000,000
19	KANTOR ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	64,000,000
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	19,000,000
20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	612,000,000

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.050.000,300	
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	87,380,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	38,284,000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	12,535,000	
22	DINAS PERIKANAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	425,051,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.115,887,000	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	170,000,000	
23	DINAS PARIWISATA		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,602,328,000	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	130,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KHAFATIF	198,000,000	
24	DINAS PERTANIAN		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	472,368,000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	34,891,065,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	110,000,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	73,000,000	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	39,612,000	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.376,800,000	
25	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN SUMBER DAYA MINERAL		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	710,000,000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	40,000,000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	503,293,000	
28	SEKRETARIAT DAERAH		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.032,400,400	

	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.266,875,000
27	SEKRETARIAT DPRD	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	51.407.148.750
28	BAPPEDA	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	970.000.000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERJISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.624.480.000
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	200.850.000
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	408.470.892,930
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.600.265,750
30	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	890.000.000
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.532.531,900
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.825,357,000
32	INSPEKTORAT	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.053.800.579
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	644.151,860
33	KECAMATAN CIMANGGU	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	43.744,000
	PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	52.200,000
34	KECAMATAN CIBALING	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.500,000

	PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	84,150,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25,000,000
35	KECAMATAN CIKEUSIK	
	PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10,000,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52,268,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23,100,000
36	KECAMATAN MUNJUL	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32,500,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	79,854,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8,000,000
37	KECAMATAN CIGEULIS	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30,000,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	79,980,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25,000,000
38	KECAMATAN PAGELARAN	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17,500,000
39	KECAMATAN BOJONG	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	44,400,000

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.050,000	
40	KECAMATAN SAKETI		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.000,000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.500,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.115,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.500,000	
41	KECAMATAN MENES		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.078,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.788,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.743,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	40.000,000	
42	KECAMATAN LABUAN		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.500,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000,000	
43	KECAMATAN JIPUT		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.250,000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.485,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.366,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	32.245,000	
44	KECAMATAN CIMANUK		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	74.538,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	41.816,000	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	52.850,000
45	KECAMATAN BANJAR	
	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37,736,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4,529,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21,000,000
46	KECAMATAN PANDEGLANG	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47,100,000
	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.839,843,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENGERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	150,400,000
47	KECAMATAN GADASARI	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34,600,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENGERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,800,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	48,560,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22,900,000
48	KECAMATAN MANDALAWANGI	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49,200,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	43,550,000
49	KECAMATAN SUMUR	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28,500,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000
50	KECAMATAN PANIMBANG	

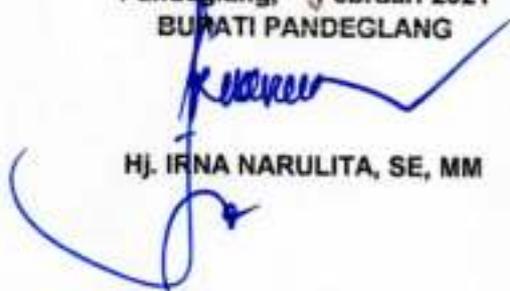
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.580,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.000,000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	98.177,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.450,000	
51	KECAMATAN PIGUNG		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20,000,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,000,912,750	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18,000,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14,800,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36,300,000	
52	KECAMATAN PATIA		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,012,000	
53	KECAMATAN CIKEDAL		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20,000,000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	46,000,000	
54	KECAMATAN CISATA		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17,536,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	37,302,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25,000,000	

55	KECAMATAN GIPEUGANG	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.000,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.800,000
56	KECAMATAN KADUHEJO	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000,000
57	KECAMATAN KARANGTANJUNG	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.629.215,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	101.400,000
58	KECAMATAN CIBITUNG	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.000,000
59	KECAMATAN GARITA	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.730,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.224,000

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18,450,000
60	KECAMATAN MEKARJAYA	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20,210,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13,374,000
61	KECAMATAN SINDANGRESMI	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30,000,000
62	KECAMATAN SUKARESMI	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30,000,000
	PROGRAM KOORDINASI KELEMBAGAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	84,240,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,850,000
63	KECAMATAN PULOSARI	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	58,800,000
64	KECAMATAN MAJASARI	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,894,428,750
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	81,500,000
65	KECAMATAN KORONGONG	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14,650,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,000,000

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34,870,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16,699,000	
66	KECAMATAN SOBANG		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20,000,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	48,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	40,000,000	
67	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	120,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,644,120,970	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	350,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	250,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100,000,000	

Pandeglang, Februari 2021
 BUPATI PANDEGLANG


 Hj. IRNA NARULITA, SE, MM



BUPATI PANDEGLANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. IRNA NARULITA, SE, MM**

Jabatan : **BUPATI PANDEGLANG**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pandeglang, Oktober 2021

BUPATI PANDEGLANG,

Hj. IRNA NARULITA, SE, MM

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
			TARGET	SATUAN
1.	Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Kepada Seluruh Masyarakat	- Angka Partisipasi Sekolah		
		a. SD Sederajat	100,00	%
		b. SMP Sederajat	100,00	%
		- Angka Partisipasi Murni		
		a. SD Sederajat	98,55	%
		b. SMP Sederajat	77,37	%
		- Angka Partisipasi Kasar		
		a. SD Sederajat	100,00	%
		b. SMP Sederajat	86,27	%
		- Angka Melek Huruf	100,00	%
		- Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,19	Tahun
		- Indeks Pendidikan	66,99	Indeks
		- PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan	1.665.671	Rp. Juta
		- PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan	842	Rp. Juta
- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor	5,23	%		
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat	- Angka Harapan Hidup	65,77	Tahun
		- Angka Kesakitan	20,15	%
		- Rata-rata lama sakit	3,73	Hari
		- Persentasi Balita Gizi Buruk	0,58	%
		Indeks Angka Harapan Hidup /Indeks Kesehatan	66,62	Indeks
		- PDRB ADHB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	441.675	Rp. Juta
		- PDRB ADHK Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	244.544	Rp. Juta
3.	Tertanggulangnya Kemiskinan dan Pengangguran yang Diprioritaskan Pada Kantong- kantong Kemiskinan dengan Memprioritaskan Pemberdayaan Masyarakat	- Jumlah Penduduk Miskin	96,421	Jiwa
		- Persentasi Penduduk di bawah Garis Kemiskinan	7,13	%
		- Tingkat Pengangguran Terbuka	7,08	%
		- Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	63,86	Indeks
		- Indeks Gini Rasio	0,17	Indeks

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
4. Meningkatkan Fungsi Serta Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Pasar	Tingkat Inflasi	8,40	%
	PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.286.988	Rp. Juta
	PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	104.186	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.807.751	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Jasa Perusahaan	51.126	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,91	%
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Perusahaan	0,83	%
5. Meningkatnya Implementasi Norma Agama	Jumlah Fasilitas/ Bantuan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keagamaan	100	Lembaga/ Organisasi
	Tidak Terjadinya Konflik Umat Beragama Skala Provinsi dan Nasional	-	Kali
	Jumlah Pembinaan, Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	91	Kali
	Angka Partisipasi Sekolah MI / SD Sederajat	100,00	%
	Angka Partisipasi Murni MI / SD Sederajat	98,55	%
	Angka Partisipasi Kasar MI / SD Sederajat	100,00	%
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,19	Tahun
	Indeks Pendidikan	66,99	Indeks
6. Meningkatnya Kapasitas Pemuda Berprestasi dan Sarana Olahraga	Juara Olahraga Tingkat Provinsi / Nasional	3	Cabang
	Pembangunan dan Pemanfaatan GOR Multiguna Sebagai Gedung Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	2	Unit
	Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan	5	Penghargaan
	Jumlah Fasilitas Pengembangan Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	20	Fasilitas/ Kegiatan
	Jumlah Fasilitas Olahraga	11	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN

7.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100,00	%
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di PUSKESMAS mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	100,00	%
		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100,00	%
		Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100,00	%
		Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100,00	%
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	100,00	%
		Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100,00	%
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100,00	%
8.	Terkendalinya Angka Kelahiran dengan Meningkatkan Kualitas Reproduksi	Jumlah Penduduk	1.351.525	Jiwa
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,13	%
		Jumlah Rumah Tangga	393.682	KK
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah Usia 20 tahun 3,5%	100,00	%
		Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%	100,00	%
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak Terpenuhi (Unmet Need) 5%	100,00	%
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB 70%	100,00	%
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	100,00	%
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100,00	%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu)petugas di setiap Desa/ Kelurahan	100,00	%
	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat untuk Memenuhi KebutuhanMasyarakat 30% Setiap Tahun	100,00	%
	Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% di SetiapTahun	100,00	%
9.	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah		
	Terselenggaranya Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Kerjasama Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) Tingkat Kabupaten/Kota dengan Pengusaha Tingkat Provinsi/ Nasional	1	1 Kali/ Tahun
	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1.939.524	Rp. Juta
	PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, danReparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.266.988	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1.330.739	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, danReparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.807.751	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	0,73	%
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,91	%
	Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	63,86	Indeks
10.	Meningkatnya Etos Kerja dan Produktivitas Masyarakat		
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan BerbasisKompetensi	100,00	%
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan BerbasisMasyarakat	100,00	%
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan PelatihanKewirausahaan	100,00	%
	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	100,00	%
	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama(PB)	100,00	%
	Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta ProgramJamsostek	100,00	%
	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100,00	%
	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	100,00	%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN

11. Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Untuk Mendorong dan Membangun Konektivitas	PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	3,162,848	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan	1,532,088	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Transportasi dan Pergudangan	1,45	%
	Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100,00	%
	Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100,00	%
	Tersedianya Halte pada Setiap Kabupaten/Kota yang Telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	100,00	%
	Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang pada Setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	100,00	%
	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka dan Guardrail) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Jalan Kabupaten/Kota	100,00	%
	Tersedianya Kapal Laut yang Beroperasi pada Lintas atau Trayek dalam Kabupaten/ Kota untuk Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang telah Berkembang pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran dan tidak ada Alternatif Angkutan Tersedianya Kapal Laut yang Beroperasi pada Lintas atau Trayek dalam Kabupaten/ Kota untuk Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang telah Berkembang pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran dan tidak ada Alternatif Angkutan Jalan	100	%
	Tersedianya Dermaga pada setiap Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/kota untuk Melayani Kapal Laut yang Beroperasi pada Trayek dalam Kabupaten/Kota pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran dan tidak ada Alternatif Angkutan Jalan	100,00	%
Rasio Elektrifikasi	100,00	%	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
	PDRB ADHB Sektor Pertambangan & Penggalian	3,924,893	Rp. Juta
	PDRB ADHB Sektor Listrik dan Gas	907,027	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Pertambangan & Penggalian	1.913.739	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1.330.739.07	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertambangan & Penggalian	60,96	%
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	0,73	%
12. Terlaksananya Pembangunan dan Penataan, Fasilitasi dan Koordinasi untuk Menjadikan Aktivitas Perekonomian Lancar	Media Massa Seperti Majalah, Radio dan Televisi	12,00	Kegiatan
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Baru seperti Website (media online)	365,00	Hari
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Tradisional Seperti Pertunjukan Rakyat	12,00	Kegiatan
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Interpersonal seperti Sarasehan, Ceramah/Diskusi dan Lokakarya	12,00	Kegiatan
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Luar Ruang Seperti Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho	12,00	Kegiatan
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi di Tingkat Kecamatan	100,00	%
	Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangannya	71,25	%
	PDRB ADHB Sektor Informasi dan Komunikasi	110,165	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Informasi dan Komunikasi	124.536	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Informasi dan Komunikasi	0,31	%
13. Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Khususnya Jalan Menuju Kawasan Agribisnis, Destinasi Pariwisata dan Pusat Pemerintahan Kecamatan	Kondisi jalan		
	a. Baik	53,58	%
	b. Sedang	24,22	%
	c. Buruk	10,52	%
	d. Rusak Berat	11,71	%
	PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	3.162.848	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan	1.532.088	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Transportasi dan Pergudangan	1,45	%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten/Kota Baik dan Sedang	77,77	%
	Persentase Terhubungnya Pusat-pusat Kegiatan dan PusatProduksi di Wilayah Kabupaten/Kota	100,00	%
	PDRB ADHB Sektor Bangunan	2,491,342	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Bangunan	1,366,160	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,83	%

14.	Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Kawasan, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Serta Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air minum yang aman	100,00	%
		Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	77,46	%
		Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan	26,97	%
		Persentase Pengangkutan Sampah	89,31	%
		Persentase pengoperasian TPA	89,31	%
		Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) Lebih dari 2 Kali Setahun	65,65	%
		Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang Diterbitkan	77,46	%
		Persentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	77,46	%
		Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu Penerbitan Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap	100	%
		Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta Digital	100,00	%
		Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20%	100,00	%
		PDRB ADHB Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,296	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,362	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,50	%
15.	Tercapainya ketersediaan, dan Peningkatan produktivitas dan mutu	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,316,970	Rp. Juta

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
produk unggulan pertanian	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,857,087	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,47	%
	Nilai Tukar Petani	103,04	Indeks

16. Meningkatkan Jaringan Kelembagaan dan Investasi Industri Pertanian	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,316,970	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,857,087	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,47	%
	Nilai Tukar Petani	103,04	Indeks
	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1,939,524	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1,330,739	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	0,73	%
17. Meningkatkan ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,316,970	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,715,702	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,47	%
	Nilai Tukar Petani	103,04	Indeks
	Ketersediaan energi dan protein perkapita	100,00	%
	Penguatan cadangan pangan	100,00	%
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100,00	%
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	100,00	%
	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100,00	%
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100,00	%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
	Penanganan daerah rawan pangan	100,00	%
18. Meningkatnya pengelolaan dan produk maritim bisnis	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,316,970	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,857,087	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,47	%
	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1,939,524	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1,330,739	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	0,73	%
19. Meningkatnya sarana dan prasarana maritim bisnis	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,316,970	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,857,087	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,47	%
20. Meningkatnya kualitas kawasan/destinasi wisata	Jumlah Wisatawan	7,421,621	Orang
	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	1,40	Hari
	PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	538,946	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	242,555	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Lainnya	2,83	%
21. Menguatnya SDM Pelaku/masyarakat Wisata	Jumlah Wisatawan	7,421,621	Orang
	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	1,40	Hari
	PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	538,946	Rp. Juta
	- PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	242,555	Rp. Juta
	- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Lainnya	2,83	%
22. Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Objek Wisata	Jumlah Wisatawan	7,421,621	Orang
	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	1,40	Hari
	PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	538,946	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	242,555	Rp. Juta

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021	
		TARGET	SATUAN
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor JasaLainnya	2,83	%
	Cakupan kajian seni 50%	100,00	
	Cakupan fasilitasi seni 30%	100,00	
	Cakupan gelar seni 75%	100,00	
	Misi kesenian 100%	100,00	
	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	100,00	
	Cakupan tempat 100%	100,00	
	Cakupan organisasi 34%	100,00	
23. Meningkatnya kelembagaan, jaringan dan Budaya Inovasi	PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan	1,665,671	Rp.Juta
	PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan	842,080	Rp.Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Pendidikan	5,23	%
	Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	63,86	Indeks
24. Meningkatnya inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	14,316,970	Rp.Juta
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	5,857,087	Rp.Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22	%
	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1,939,524	Rp.Juta
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1,330,739	Rp.Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor industri pengolahan	0,73	%
	Nilai Tukar Petani	103,04	Indeks
25. Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani	- Implementasi Maturitas Level SPIP	Level 3	level
	- Kapabilitas APIP	Level 3	Level
	- Opini LKD	WTP	Nilai
	- Nilai SAKIP	BB	Nilai
	- Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas pelayanan publik	86,10	%
	- Rata-rata Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal	95,00	%
	-PDRB ADHB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,570,564	jt
	-PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,530,508	jt
	-Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	16,37	share

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021		
		TARGET	SATUAN	
	- Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	365,00	hari	
	- Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	12,00	kali	
	- Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	12,00	kali	
	- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan	100,00	%	
26	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Opini LKD		
		Peningkatan Pendapatan Daerah	WTP	
		Persentase kenaikan PAD	Jt	
		Rasio Kemandirian Daerah	150,00	
		10,00	%	
27	Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah	PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	104,186	Jt
		PDRB ADHB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	946,422	Jt
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor jasa perusahaan	0,83	NTB
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	3,41	NTB
		PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	14,316,970	%
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,47	Share
		Kemampuan Investasi	659,12	%
28	Terciptanya masyarakat yang demokratis	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik	86,10	%
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	365,00	hari
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	12,00	kegiatan
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	12,00	kegiatan
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan	100,00	%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2021		
		TARGET	SATUAN	
	Tidak terjadinya konflik bemuansa suku, ras dan antargolongan, konflik politik, konflik perebutan sumber daya alam, diskriminasi, dan kekerasan lain yang merusak fasilitas publik, serta tindakan terorisme	-		
	Tingkat Partisipasi Politik Pemilu	75	%	
29	Terciptanya Supremasi hukum	Implementasi Maturitas Level SPIP	Level 3	level
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	100,00		%
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten/ Kota	100,00		%
	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	100,00		%
	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100,00		%

30	Pengurangan Risiko Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	%
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	%
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	100	%
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK	100	%
		Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala provinsi	100	%
		Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi	100	%
		Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	100	%
		Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	100	%
		Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	100	%
		Evakuasi korban bencana skala provinsi	100	%
		Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	100	%

Sasaran ini didukung oleh Anggaran Organisasi Perangkat Daerah:

NO	NAMA URUSAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	929.530.451.811	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	929.530.451.811	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	394.814.425.597	
4	Dinas Kesehatan	270.607.705.971	
5	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah	124.206.719.626	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40.888.075.676	
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.386.153.496	
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16.501.922.180	
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.277.054.372	
10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pert	14.277.054.372	
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	35.639.172.898	
12	Satuan Polisi Pamong Praja	6.375.088.186	
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.264.084.712	
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	17.049.695.755	
15	Dinas Sosial	17.049.695.755	
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.511.139.238	
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.511.139.238	
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.649.910.027	
19	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	5.649.910.027	

20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.693.970.365	
21	Dinas Ketahanan Pangan	4.693.970.365	
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	253.521.000	
23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	253.521.000	
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	13.794.238.872	
25	Dinas Lingkungan Hidup	13.794.238.872	
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.613.178.300	
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.613.178.300	
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.591.695.537	
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	12.591.695.537	
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.183.790.000	
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	10.183.790.000	
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	11.530.189.973	
34	Dinas Perhubungan	11.530.189.973	
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.588.539.336	
36	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	4.588.539.336	
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.341.676.542	
38	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	4.341.676.542	
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.896.590.793	
40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.538.134.200	

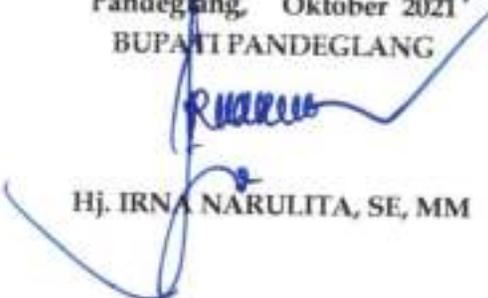
66	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	360.393.000	
67	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	58.750.000	
68	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	58.750.000	
69	SEKRETARIAT DAERAH	48.688.915.743	
70	Sekretariat Daerah	48.688.915.743	
71	SEKRETARIAT DPRD	83.259.995.736	
72	Sekretariat DPRD	83.259.995.736	
73	PERENCANAAN	9.920.452.788	
74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.920.452.788	
75	KEUANGAN	62.723.941.847	
76	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	53.487.166.361	
77	Badan Pelayanan Pajak Daerah	9.236.775.486	
78	KEPEGAWAIAN	9.820.551.722	
79	Badan Kepegawaian dan Diklat	9.820.551.722	
80	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.258.299.600	
81	Badan Kepegawaian dan Diklat	1.258.299.600	
82	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	285.275.000	
83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	285.275.000	
84	INSPEKTORAT DAERAH	16.514.487.581	
85	Inspektorat	16.514.487.581	
86	UNSUR KEWILAYAHAN	95.209.538.108	
87	KECAMATAN	95.209.538.108	
88	Kecamatan Cimanggu	2.478.011.250	
89	Kecamatan Cibaliung	2.212.422.202	
90	Kecamatan Cikeusik	2.285.725.394	
91	Kecamatan Munjul	2.134.759.840	
92	Kecamatan Cigeulis	2.279.369.257	
93	Kecamatan Pagelaran	2.618.267.738	
94	Kecamatan Bojong	2.160.565.278	

41	Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung	1.358.456.593	
42	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.739.789.720	
43	Dinas Pemuda dan Olah Raga	6.739.789.720	
44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	239.828.000	
45	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	239.828.000	
46	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	100.000.000	
47	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	100.000.000	
48	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	365.000.000	
49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	365.000.000	
50	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.778.513.501	
51	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.778.513.501	
52	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	31.109.000	
53	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	31.109.000	
54	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	59.940.515.484	
55	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.286.011.175	
56	Dinas Perikanan	6.286.011.175	
57	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.045.083.233	
58	Dinas Pariwisata	6.045.083.233	
59	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	42.135.472.304	
60	Dinas Pertanian	42.135.472.304	
61	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.267.355.772	
62	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	4.267.355.772	
63	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	787.450.000	
64	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	787.450.000	
65	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	360.393.000	

95	Kecamatan Saketi	2.479.345.450	
96	Kecamatan Menes	2.501.290.202	
97	Kecamatan Labuan	2.354.948.148	
98	Kecamatan Jiput	2.914.551.538	
99	Kecamatan Cimanuk	2.270.796.108	
100	Kecamatan Banjar	2.490.504.183	
101	Kecamatan Pandeglang	7.166.173.300	
102	Kecamatan Cadasari	2.509.790.800	
103	Kecamatan Mandalawangi	2.927.321.594	
104	Kecamatan Sumur	2.100.541.762	
105	Kecamatan Panimbang	2.298.070.276	
106	Kecamatan Picung	1.978.378.302	
107	Kecamatan Angsana	2.272.831.750	
108	Kecamatan Patia	1.523.397.152	
109	Kecamatan Cikedal	2.221.655.498	
110	Kecamatan Cisata	2.812.088.025	
111	Kecamatan Cipeucang	2.159.639.721	
112	Kecamatan Kaduhejo	2.497.841.640	
113	Kecamatan Karangtanjung	6.228.427.702	
114	Kecamatan Cibitung	2.464.508.513	
115	Kecamatan Carita	2.722.331.218	
116	Kecamatan Mekarjaya	2.277.491.771	

117	Kecamatan Sindangresmi	1.902.186.714	
118	Kecamatan Sukaresmi	2.158.036.899	
119	Kecamatan Pulosari	1.966.305.606	
120	Kecamatan Majasari	7.387.331.561	
121	Kecamatan Koroncong	2.313.239.688	
122	Kecamatan Sobang	2.141.392.028	
123	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.846.401.362	
124	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.846.401.362	

Pandeglang, Oktober 2021
BUPATI PANDEGLANG



Hj. IRNA NARULITA, SE, MM

PENGHARGAAN- PENGHARGAAN TAHUN 2017- 2020



Penghargaan Opini BPK WTP Kabupaten Pandeglang Tahun 2017



Penghargaan Opini BPK WTP Kabupaten Pandeglang Tahun 2017



Penghargaan sebagai Desa Inspiratif Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 dari Kementerian Desa



Penghargaan sebagai Desa Inspiratif Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 dari Kementerian Desa



Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM Tahun 2018 dari Kementerian Hukum dan HAM



Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM Tahun 2018 dari Kementerian Hukum dan HAM



Penghargaan SAKIP dari Kemenpan dan RB Tahun 2018 (Mendapat Predikat BB)



Penghargaan SAKIP dari Kemenpan dan RB Tahun 2018 (Mendapat Predikat BB)



MENERIMA PENGHARGAAN ATAS PENILAIAN
SAKIP KABUPATEN PANDEGLANG OLEH
KEMENPAN-RB TAHUN 2019.





Penghargaan Kabupaten Peduli HAM Kabupaten Pandeglang Tahun 2019



Kabupaten Pandeglang meraih Penghargaan Innovative Government Award 2020, dengan kategori Sangat Inovatif. Penghargaan diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Republik Indonesia



Pemerintah Pandeglang meraih Penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020



Pemerintah Pandeglang meraih Penghargaan WTP Untuk Keempat Kali

Tahun 2019

[PTD2W





**Pemerintah Pandeglang meraih Penghargaan
“ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA”
&
“KOTA LAYAK ANAK Tahun 2021”
(Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)**



Penghargaan "CENDIKIAWAN KAMPUNG AWARD 2021"



Penghargaan Sebagai
Badan Publik yang INFORMATIF Tahun 2021



The image features a central trophy with a silver base and a red and white flame-like top. The trophy is inscribed with the following text: "INOVASI ADMINISTRASI NEGARA KABUPATEN PANDEGLANG", "INAGARA Award", "JEDAH ALKOTAPRANU INAGARA", "KABUPATEN PANDEGLANG", "TAHUN 2021", and "PENGHADIRAN GURUH TAMBUNG KABUPATEN PANDEGLANG PERALTAH INOVASI ADMINISTRASI NEGARA".

ALHAMDULILLAH
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

Meraih
INAGARA AWARD
Inovasi Administrasi Negara
Tahun 2021

www.pandeglangkab.go.id



**PENGHARGAAN BIDANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DARI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN**



*Penghargaan Kategori Kepatuhan Norma Standar Dan Prosedur Kepegawaian Tahun 2020
Yang Diserahkan Oleh Kepala Kantor Regional III BKN Bandung*

[PTD2W



Penghargaan Penangan ODGJ Dari Kemenkes Dan Provinsi

[PTD2W



**OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP)
Yang Ke lima**

[PTD2W



Daftar Penghargaan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang

TAHUN 2017-2021

NO	NAMA PENGHARGAAN	KEMENTERIAN / LEMBAGA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kabupaten dengan Investasi Terbaik (Sindo Government Award 2017)	CEO MNC Grup	2017
2	Anugerah Pangripta Nusantara untuk kategori Kabupaten terbaik dalam penyusunan RKPD Tingkat Provinsi Banten Tahun 2017	Mendagri RI	2017
3	Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2016	Kepala BPK RI Provinsi Banten	2017
4	Penghargaan Kabupaten peduli terhadap Hak Asasi Manusia	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	2017
5	Predikat "B" atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Menpan RB RI	2018
6	Best Woman Regional Leaders 2018	Marketing Direktur Obsession Media Group	2018
7	Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2017	Kepala BPK RI Provinsi Banten	2018
8	Penghargaan Indeks Desa Membangun	Menteri Desa PDTT RI	2018
9	Penghargaan Kabupaten peduli terhadap Hak Asasi Manusia	Wakil Presiden RI	2018
10	Predikat "BB" atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Menpan RB RI	2019
11	Peringkat ke 3 Terbaik SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) se-Indonesia	Wakil Presiden RI	2019
12	Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2018	Kepala BPK RI Provinsi Banten	2019
13	Penghargaan Kabupaten Tanggap Bencana	Mensos RI	2019
14	Penghargaan Kabupaten peduli terhadap Hak Asasi Manusia	Dirjen HAM Kemenkumham RI	2019
15	Penghargaan Sebagai Daerah yang berpartisipasi Aktif dalam Penanggulangan Bencana	Kepala BNPB	2020
16	Predikat "BB" atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Menpan RB RI	2020
17	Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2019	Kepala BPK RI Provinsi Banten	2020

18	Penghargaan Kabupaten peduli terhadap Hak Asasi Manusia	Dirjen HAM Kemenkumham RI	2020
19	Predikat "Sangat Inovatif" Innovative Government Award 2020	Sekretaris Balitbang Kemendagri	2020
20	penghargaan Kategori Kepatuhan Norma Standar dan Prosedur Kepegawaian Tahun 2020	Kanreg BKN Bandung	2021
21	Kabupaten Pandeglang meraih penghargaan kategori Pelayanan Prima	Menpan RB RI	2021
22	Predikat "BB" atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Menpan RB RI	2021
23	Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020	Kepala BPK RI Provinsi Banten	2021
24	penghargaan bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	BNN Prov Banten	2021
25	Penghargaan Inagara Award Tahun 2021	LAN RI	2021
26	Penghargaan Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 Kategori Pratama	Kementrian PPA	2021
27	penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Madya	Kementrian PPA	2021
28	penghargaan dan tanda kehormatan Wredatama Nugraha Utama	MenkoPMK	2021
29	penghargaan katagori pencapaian program kesehatan jiwa terbaik seprovinsi banten	Prov Banten	2021
30	Penghargaan Badan Publik Informatif Tahun 2021	Prov Banten	2021
31	Peringkat ke III untuk MTQ XVIII Provinsi Banten	Prov Banten	2021
32	penghargaan Cendekiawan Kampung Award 2021	0	2021